ANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA PERBATASAN DENGAN KAMBOJA STUDI KASUS: KONFLIK WILAYAH SEKITAR KUIL PREAH VIHEAR 2008

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

TRIVIDA WIDIA
14323050

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2018

ANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA PERBATASAN DENGAN KAMBOJA STUDI KASUS: KONFLIK WILAYAH SEKITAR KUIL PREAH VIHEAR 2008

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

TRIVIDA WIDIA

14323050

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Kebijakan Thailand dalam Sengketa Perbatasan dengan Kamboja

Studi Kasus: Konflik Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear 2008

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 Oktober 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Irawan Jati, S,IP.,M.Hum.,M.S.S	
2. Enggar Furi Herdianto, S,I.P.,M.A.	
3. Karina Utami Dewi, S.I.P.,M.A	

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Trivida Widia
No. Mahasiswa	: 14323050
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Kebijakan Thailand dalam Sengketa Perbatasan dengan Kamboja, Studi Kasus: Konflik Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear 2008

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang menyatakan,

Trivida Widia

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk beberapa orang yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu:

Ibudan Bapak Tercinta

Terima kasih untuk doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada Aufa. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan membuka perjalanan baru bagi Aufa agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Ibu dan Bapak bahagia serta bangga. Penulis ingin membuktikan kepercayaan Ibu dan Bapak kepada Vida untuk menyelesaikan sekolah sampai selesai dan satu tanggung jawab Vida sebagai kakak sudah tercapai. Semoga Vida bisa mencapai tanggung jawab lain serta Ibu dan Bapak senantiasa menemani, mendukung, dan percaya pada Vida hingga akhir. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT.

Trivida Widia

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan. Semoga kalian besok bisa lebih baik dan sukses selalu.

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.”

“The world seems a book and those who do not travel means read only one page”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat-Nya tanpa henti kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW shallawat serta salam selalu penulis curahkan untuk sang Nabi.
3. Kedua orang tua tercinta, makasih ya pah mah untuk semuanya. Alhamdulilah sudah sampai pada titik ini semua juga berkat doa kalian berdua yang tanpa henti sehingga Allah juga memudahkan proses ini. Kemudian kepada kedua Kakak penulis yang membantu untuk memberikan sokongan dana untuk ini dan itu HAHA (gua udah kelar nih!)
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.

5. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi, saran, masukan, dan rasa positif kepada penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
6. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan terkait hal-hal menyangkut perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
7. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.,Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan banyak berbuat kesalahan. Semoga para Dosen-Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
8. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga untuk kenangan menyenangkan kita bersama, semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur panjang, dan lancar dalam segara urusan.

9. Teman-teman OLD BUT GOLD nnx and dyne, you guys made my life, thanks for always being there deep and top, ya walaupun kalian selalu marah gara-gara aku jarang main bareng HAHAH udah tuir jangan ngambek terus geng. Makasi sudah mewarnai persahabatan aku di jogja ini ya.
10. Teman-teman misqueenQ: Vikram temen curhat dalam hal apapun kemana-mana selalu berdua mau beli ini itu pasti yang diajak selalu doi, siti temen sekosan makasi sit udah mau sekosan sama aku terus makan bareng sama aku makasi buat semuanya, devi pesen aku sih kalau kamu ngomong tolong di filter entah kamu ketemu siapapun di masa depan semoga bisa lebih mawas sikap, elayanaQ makasi ya el untuk semuanya makasi sudah menjamu saya di Lombok aku nanti main lagi ya kesana, Bintar Sang MotivatorQ terima kasih untuk selalu memberikan motivasi serta bantuannya untuk selalu mempermudah proses skripsi.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan DPS Pak Jati yang saya sayangi; Aufa, Elayana, Devi dan Rana GUYS THANKS YA CANT DESCRIBE MY FEELINGS WHEN I WROTE THIS, LITERALLY IM HAPPY! HAHA
12. MERCON’s geng udah kelar nih cant wait to meeting you guys sebentar lagi bakal jadi anak ciks
13. Terima Kasih untuk kamu si abu-abu tanpa kamu aku gakan bisa ke kampus meskipun kamu sangat boros bensin iya kamu motorQ, dan notebook yang dikit-dikit ngadat Alhamdulilah kamu sudah membantu proses penulisan dengan lancar kalau gada kamu aku ga bisa nyari data dan menulis skripsi ini.

14. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi tim dan partner terbaik.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Oktober 2018

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
HALAMAN DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Signifikansi 7
1.5 Cakupan Penelitian 8
1.6 Kajian Pustaka 8
1.7 Landasan Teori/Konsep atau Pendekatan 14
1.8 Metode Penelitian 17
1.8.1 Jenis Penelitian 17
1.8.2 Subjek Penelitian 17
1.8.3 Alat Pengumpul Data 18
1.8.4 Proses Penelitian 18
BAB II KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR PADA TAHUN 2008 19
2.1 Pendaftaran Kuil Preah Vihear sebagai Warisan Dunia 2008 19
2.2 Penolakan Thailand terhadapan putusan UNESCO 2008 24
2.3 Penempatan militer Thailand-Kamboja di wilayah Kuil Preah Vihear 27
2.5 Proses Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja 30
BAB IIITEORI *DECISION MAKING* 36
3.1 Prospek dari teori *Decision Making* 36
3.2 Model dari *Decision Making* 41
1. Rational Actor Model 42

2. The Bounded Rationallity Model 43

3. The Bureaucratic Politics model..... 44

BAB IVANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR 2008..... 45

4.1. Implementasi Teori *Decision Making* dalam sengketa Perbatasan kuil Preah Vihear 2008 45

4.2 Analisis *Decision Making* Thailand dalam kasus perbatasan wilayah kuil Preah Vihear 2008..... 51

4.2.1 Faktor Internal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear 2008..... 51

A. Persaingan Partai Politik Thailand..... 51

B. Kuil Preah Vihear sebagai Identitas Thailand..... 56

C. Gerakan PAD sebagai Sikap Masyarakat Thailand 58

4.2.2 Faktor Eksternal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear 2008..... 59

A. Pendaftaran Kuil Preah Vihear ke UNESCO 2008..... 59

B. Perjanjian Franco-Siam 1904-1907 61

4.3 Analisis *Rational Actor Model* dalam pengambilan kebijakan Thailand mengenai kasus perbatasan kuil Preah Vihear 2008 65

BAB VPENUTUP..... 68

5.1 Kesimpulan 68

5.2 Rekomendasi..... 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar

Gambar1. 1 Peta Klaim Thailand atas permasalahan wilayah sekitar kuil Preah Vihear .. 4

Tabel

Tabel 3. 1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Teori *Decision Making* 41

Tabel 4. 1 Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Kebijkan Thailandterhadap isu kuil Preah Vihear 2008..... 50

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asia Nations
CPP	: Cambodian People Party
DAS	: Daerah Aliran Sungai
ICJ	: International Court of Justice
JBC	: Joint Border Commision
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PAD	: People Alliance for Democracy
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPP	: People's Power Party
TRT	: Thai Rak Thai
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ABSTRAK

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai kuil Preah Vihear terjadi kembali pada tahun 2008. Hal ini dipicu karna pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO sebagai salah satu warisan dunia.Pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO merupakan tahap baru mengenai hubungan antara Thailand dan Kamboja mengenai konflik perbatasan. Disisi Thailand, konflik yang muncul dipicu karna situasi dan kondisi domestik Thailand yang tidak stabil.Gerakan nasionalis PAD di Thailand menolak pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO. Gerakan PAD menuduh pemerintah Samak telah menjual tanah milik Negara.Maka pemerintah Thailand membuat kebijakannya atas tekanan dari domestiknya.

Kata kunci: *Konflik perbatasan kuil Preah Vihear, konflik Thailand dan Kamboja,*UNESCO, *Decision Making*

Abstract

Border dispute between Thailand and Cambodia was erupted in 2008. This was triggered by Cambodia's government to registration Preah Vihear temple to the UNESCO as a world heritage list.The register of Preah Vihear temple to the UNESCO as a world heritage list was a new phase of Thailand and Cambodia relations towards the border dispute.The dispute was also generated by Thailand's domestic situation. The Thai nationalist group PAD rejected the registration of Preah Vihear temple to UNESCO. The PADaccused Samak's government of selling the nation. It means that the Thai government formulated its policy upon the pressure from domestic dynamics.

Keywords: *Border dispute Preah Vihear temple, Thailand and Cambodia conflict, UNESCO, Decision Making*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik perbatasan yang berawal dari ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat berdasarkan pemerintahan Perancis dan pemerintahan Siam (Thailand) yaitu meliputi wilayah kuil Preah Vihear menghadapkan kedua Negara pada konflik perbatasan(BBC, 2013). Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang diperebutkan oleh dua anggota dari Negara Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) yaitu Thailand dan Kamboja. Letak kuil Preah Vihear ini di puncak penggunungan Dangrek dengan ketinggian 525 meter atau 657 meter di atas permukaan air laut, wilayah ini tepatnya terletak diantara wilayah perbatasan Kabupaten Kantharalak (Amphoe) Provinsi Si Sa Ket, timur laut Thailand dan Kabupaten Choam Khasant, Provinsi Preah Vihear, Utara Kamboja. Wilayah Preah Vihear merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa situs candi kuno hingga 228 candi (Cipto, 2007, p. 69).

Pada tahun 1953, setelah Kamboja meraih kemerdekaan, lalu Thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat kuil Preah Vihear dengan adanya pos polisi di Pegunungan Dangrek. Hal ini diprotes oleh pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Sihanouk. Beberapa negosiasi yang dilakukan dari tahun 1953 sampai 1958 tidak mencapai hasil yang positif. Karena itu, Kamboja memutuskan untuk mengirim kasus ini keInternational Court of Justice (ICJ).

Proses penyelesaian dimulai dengan mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara. Berdasarkan penjelasan dari kedua Negara pada sidang ICJ tentunya kedua Negara tersebut berasumsi bahwa kuil Preah Vihear adalah bagian dari Negaranya. Selain mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara, putusan yang diambil ICJ berdasarkan sejarah dan fakta melalui perjanjian perbatasan yang dilakukan antara Kerajaan Siamdan Perancis pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangkrek Timur dimana kuil Preah Vihear berada. Ada beberapa pasal diantaranya (Tun, 2011, pp. 14-15);

> *Article 1:*
> The frontier between Siam and Cambodia starts, on the left shore of the Great Lake, from the mouth of the river Stung Roluos, it follows the parallel from that point in an easterly direction until it meets the river Prek Kompong Tiam, then, turning northwards, it merges with the meridian from that meetingpoint as far as the Pnom Dang Rek mountain chain. From there it follows the watershed between the basins of the Nam Sen and the Mekong, on the one hand, and the Nam Moun, on the other hand, and joins the Pnom Padang chain the crest of which it follows eastwards as far as the Mekong. Upstream from that point, the Mekong remains the frontier of the Kingdom of Siam, in accordance with Article 1 of the Treaty of 3 October 1893.
>
> *Article 3:*
>
> There shall be a delimitation of the frontiers between the Kingdom of Siam and the territories making up French IndoChina. This delimitation will be carried out by Mixed Commissions composed of officers appointed by the two contractingcountries. The work will relate to the frontier determined by Articles 1, and the region lyingbetween the Great Lake andthe sea.

Sesuai dengan artikel 1 dan 3 kedua belah pihak sepakat membentuk Komisi untuk memetakan garis-garis batas Negara di berbagai daerah, termasuk bagian timur dari jangkauan Dangrek. Komisi tersebut terdiri dari petugas Perancis dan Siam.Namun, petugas dari perwakilan Siam kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sehingga petugas dari perwakilan Perancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survei mereka

kepada komisi bersama. Akibatnya, sebelas peta dikomunikasikan ke pemerintah Siam sebelum akhir 1907. Salah satu peta menutupi bagian timurbagian dari Range Gunung Dangrek dan menunjukkan garis batas antaraSiam dan Kamboja. Garis batas melencengdari garis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diatur dalam Pasal 1 dari Perjanjian 1904. Penyimpanganmembuat seluruh tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear masuk kedalam wilayah kedaulatan Kamboja(Alvarez, 2011, hal. 1035). Kemudian putusan ICJ keluar pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagianatas kedaulatan Kamboja dan Thailand wajib menarik pasukannya dari wilayah tersebut (Dewi, 2013, hal. 3-4).

Konflik ini sempat meredam pasca putusan 1962 kedua Negara tidak pernah membahas lagi mengenai konflik perbatasan Preah Vihear. Namun, eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi lagi pasca diputuskannya kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia milik Kamboja pada tahun 2008.Konflik yang kini timbul diperparah dengan adanya ketidakstabilan politik domestik Thailand. Gerakannasionalis Thailand menggunakan isu Preah Vihear untuk menggulingkan Perdana Menteri Samak Sundarajev(Dewi, 2013, hal. 3-4).

Pada awalnya, pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Samak Sundarajev menyatakan bahwa Thailand akan mendukung kuil Preah Vihear dalam daftar warisan dunia,dalam pernyataan yang dinyatakan itu bahwa persetujuan tersebut tidak termasuk dalam wilayahsengketa dengan kata lain tidak boleh mempengaruhi batas yang disengketakan.Kemudian,hal ini yang

menyebabkan kemarahangerakannasionalis Thailand. Gerakan nasionalis People Alliance For Democracy (PAD)berdemonstrasi di dekat kuil Preah Vihear dan menyebabkan situasi kacau di daerah perbatasan.Hal ini di respon oleh pemerintah Kamboja, oleh karena itu pemerintah Kamboja menutup perbatasan di sekitar Preah Vihear untuk orang-orang dari Thailand.Gerakan nasionalis berasumsi bahwa persetujuan yang diberikan oleh Samak karena adanya imbalan atas konsesi bisnis di Kamboja (Mackinnon, 2008). Disamping itu, hal ini juga dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Samak di Thailand. Partai oposisi Demokrat berkoalisi dengan gerakan PAD dalam penolakannya mengenai pendaftaran kuil Preah Vihear ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)(Tun, 2011, p. 23).

Gambar1. 1 Peta Klaim Thailand atas permasalahan wilayah sekitar kuil Preah Vihear

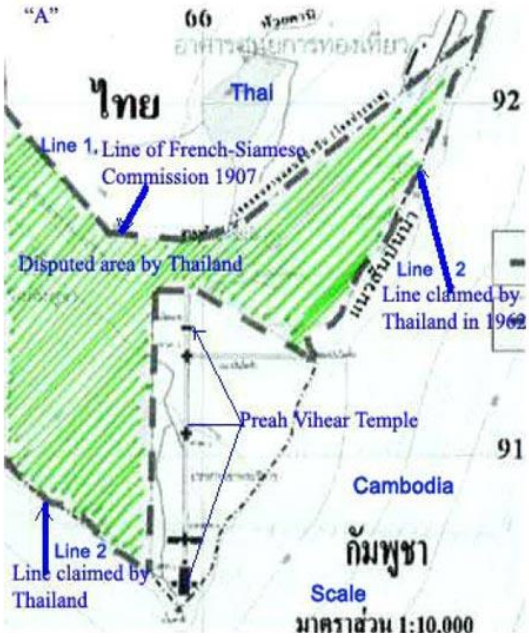

Sumber Gambar diambil dari, Kenneth T. So 'Cambodia Information Center',*PREAH VIHEAR: A KHMER HERITAGE,* 25 Juli 2008 <http://www.cambodia.org/Preah_Vihear/?history=A+Khmer+Heritage>

Wilayah yangdisengketakan tersebut adalah wilayah disekitar kuil Preah Vihearyaitu tanah 4.6 kilometer persegi. Thailand dalam klaim yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi tuntutan tersebut berdasarkan pada intepretasi mengenai putusan ICJ di 1962 yang hanya terbatas pada kedaulatan atas wilayah kuil Preah Vihear, akan tetapi garis batas itu tidak memiliki status hukum dari keputusan yang telah dikeluarkan(Tun, 2011, pp. 22-24).Konflik yang telah usai kini memasuki era baru, yang diperebutkan adalah tanah yang berada di sekitar yang mendekati dengan wilayah perbatasan Thailand. Tanah ini yang dituntut oleh pihak Thailand atas kepemilikannya sedangkan putusan dari ICJ sudah jelas bahwa kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja.

Pada bulan April 2009, tentara kedua Negara salingtembakmelintasi perbatasan yang disengketakan. Pada Februari 2011 setidaknya delapan orang tewas dalam beberapa hari pertempuran. Di bulan April, karena bentrokan yang meluas memaksa puluhan ribu orang untuk meninggalkan wilayah sekitar sengketa (BBC, 2017). Penduduk yang tinggal disekitar wilayah kuil terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya padahal penduduk yang tinggal di daerah tersebut sebagian dari masyarakat kedua Negara yang berkonflik(Irewati, 2015, pp. 168-9).

Untuk menghentikan konflik tersebut maka proses penyelesaian sengketa pun dilakukan oleh kedua Negara. Beberapa negosiasi yang dilakukan pada tahun 2008 pertemuan antara PerdanaMenteri Samak Sundarajev dan Perdana Menteri Hun Sen menghasilkan putusan berupa penarikan militer dari wilayah sengketa tetapi masih belum jelas kapan penarikan itu dilakukan (Raharjo S. N., 2013, hal.

116). Selain usaha Negosiasi untuk mencari solusi bagi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, usaha dengan melibatkan pihak ketika juga dilakukan dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICJ dan ASEAN.Berbeda dengan Kamboja, menurut Thailand proses penyelesaian dapat terselesaikan dengan baik apabila dengan metode negosiasi saja. Sementara Kamboja menginiginkan adanya pihak ketiga dalam capur tangannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebelum kasus ini ditangani oleh ASEAN, Kamboja dengan langkah sepihaknya melaporkan kasus ini ke pihak PBB namun PBB kembali merujuknya ke ASEAN (Irewati, 2015, hal. 170).

Pada tanggal 22 Februari 2011, Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah berusaha untuk menghentikan konflik yang terjadi dengan melakukan pertemuan yang di fasilitasi ASEAN di Jakarta. Pada saat itu, kedua belah pihak sepakat untuk menerima tim pemantau dari Indonesia yang akan dikirim ke wilayah yang di sengketakan. Selain itu, pertemuan yang di fasilitasi ASEAN, kedua Negara sepakat untuk pertemuannya dalam Joint Border Commision *(*JBC)dengan melibatkan menteri pertahanan kedua Negara yang akan di selenggarakan pada April 2011 di Bogor 2011.Disamping itu, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut, di sini juga ASEAN terlihat ingin memperkuat sistem institusi ASEAN agar lebih dipercaya oleh negara-negara lainnya sebagai institusi regional(ICJ, 2013, hal. 281). Hal ini menjadi tantangan bagi ASEAN sebagai organisasi internasional dalam menengahi anggotanya yang berkonflik serta signifikansi keberadaan dari organisasi ASEAN.

1.2 RumusanMasalah

Mengapa Thailand memunculkan isu Preah Vihear kembali pada tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana sengketa ini dapat terselesaikan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua Negara dalam menemukan solusi wilayah sekitarkuil Preah Vihear baik melalui bilateral atau multilateral.
2. Menganalisis mengenai munculnya isu perbatasan diiringi dengan kebangkitan kelompok nasionalis Thailand
3. Menganalisis alasan Kebijakan pemerintah Thailand dalam memunculkan kembali isu kuil Preah Vihear.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak yang belum membahas secara rinci mengapa Thailand mengungkit kembali konflik perbatasan kuil Preah Vihear dengan teori atau konsep yang digunakan dalam mengkaji lebih dalam mengenai timbulnya kembali isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang telah selesai oleh pihak ICJ di tahun 1962. Sebagain besar dari penelitian ini akan membahasmengenai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan Thailand dalam isu perbatasan kuil Preah Vihear. Pengaruh dalam pengambilan keputusan meliputi domestik dan internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan Thailand. Hal ini yang menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti, dengan menggunakan teori*decision making* akan menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan

Thailand dalam memunculkan kembali isu Preah Vihear, melalui teori*decision making* pula akan dijelaskan aktor-aktor penting yang mempengaruhi kebijakan Thailand dalam isu perbatasan dengan Kamboja.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian hubungan internasional, konflik yang terjadi kembali membahas mengenai perbatasan antara Thailand dan Kamboja.Konflik yang sempat meredam kini pada tahun 2008 memasuki era baru pasca putusan UNESCO menobatkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Bahkan konflik ini muncul kembali karena dipicu oleh kepentingan politik dari beberapa partai di Thailand untuk menggulingkan serta menurunkan popularitas pemerintahan pada saat itu. Pada penelitian ini juga akan mencakup hingga faktor internasional yang membuat pemerintah Thailand memunculkan kembali isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.

1.6 Kajian Pustaka

Teritorial atau wilayah suatu Negara merupakan salah satu syarat penting bagi keberadaan sebuah Negara.Morgenthau memandang bahwa teritorial adalah kekuatan nasional sebuah Negara(2010, hal. 123-125). Lalu kekuatan nasional Negara dibagi ke dalam dua katagori yaitu;

1. *Tangible Power* yaitu kekuatan suatu Negara yang akan diukur melalui luas wilayah, populasi openduduk dan sumber daya alam
2. *Intangible Power* yaitu kekuatan suatu Negara yang hanya akan dapat diukur kualitasnya seperti tingkat pendidikan dan resiko bencana alam.

Kekuatan Negara termasuk dalam bagian dari teritorial suatu Negara yang dapat dilihat keberadaanya sehingga termasuk dalam katagori tangible power. Faktor tangible inilah yang menjadikan alasan pertama mengapa Negara begitu *concern* dengan batas wilayahnya. Sedangkan faktor dari intangible power digunakan untuk menggambarkan teritori atau wilayah sebagai identitas penduduk suatu Negara dan menyangkut hal-hal yang bersifat jati diri bangsa sebab seringkali konflik wilayah yang terjadi diakibatkan oleh alasan identitas. Kamboja dan Thailand mempunyai peta yang berbeda atas penggambaran batas-batas dari wilayahnya. Apabila dikaitkan dengan kekuatan nasional Negara dari *Intangible power,*kedua Negara masing-masing memiliki sejarah mengenai wilayah ini yang merupakan pernah menjadi bagian dari Thailand ketika masa kerajaan Siam dan Menurut Kamboja kuil tersebut dibangun oleh kerajaan Khamer. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya *histori*stersebut membuat wilayah ini begitu penting bagi kedua Negara selain menambah luas wilayah kedua Negara serta nilai plusnya adalah ada sumber sejarah diwilayah tersebut.

Menurut Raharjo (2013, hal. 110-112)konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja karena adanya perbedaan peta atas batas Negara yang dibuat oleh Thailand dan Kamboja. Garis perbatasan ini merupakan awal dari perjanjian yang dilakukan antara pemerintah kolonial Perancis yang pada saat itu menguasai Kamboja dengan kerajaan Siam atau yang sekarang sudah menjadi Negara Thailand. Pasca perang Franco dan Siam 1893 membuat wilayah Kamboja meluas hingga sisi kiri Sungai Mekong. Kedua Negara sepakat melakukan perjanjian batas-batas Negara pada tahun 1904 dan 1907.

Kemudian dibentuklah komisi yang terdiri dari perwakilan kedua Negara yang bertugas untuk memetakan perbatasan. Namun, perwakilan dari Siam kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sehingga petugas dari Perancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survey yang dilakukan bersama. Pada saat itu tidak ada yang keberatan atas peta annex I yang dihasilkan komisi bersama tersebut. Masalah mucul ketika Siam berubah menjadi Thailand pada tahun 1940 yang mengklaim bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan peta tersebut dimana kuil Preah Vihear seharusnya menjadi bagian dari wilayah Thailand. Ketika Kamboja meraih kemerdekaanya pada tahun 1953 dimanfaatkan oleh Thailand untuk menolak perjanjian Perancis dan Siam 1904-1907. Kuil Preah Vihear diokupasi oleh Thailand pada tahun 1954 dengan menpatkan tentara di area tersebut. Sedangkan langkah dari Kamboja untuk menghentikan okupasi tersebut pada 6 oktober 1959 mendaftarkan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan pertimbangan bahwa peta Annex I sudah dikosnultasikan dan diterima oleh pemerintahan Siam dan tidak pernah ada keberatan yang duajukan, bahkan peta tersebut sudah dicetak oleh Thailand, maka pada 15 Juni 1962 ICJ menyatakan kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja dan memerintahkan Thailand untuk menarik militernya di wilayah tersebut. Pasca putusan ICJ, ketegangan diplomatik dan militer menurun. Selama beberapa dekade setelahnya isu mengenai kuil Preah Vihear tidak terlalu diungkit oleh Kamboja dan Thailand.

Menurut Dewi(2013, hal. 6-8) mengenai konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memasuki era baru di tahun 2008, setelah putusan

UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear menjadi warisan dunia milik Kamboja. Pemerintah Thailand tidak terima atas putusan tersebut sebab tanpa persetujuan dari Thailand untuk memutuskan Preah Vihear masuk kedalam daftar warisan dunia. Pemerintah Thailand meminta kepada UNESCO agar proses warisan dunia harus didaftarkan oleh Kamboja dan Thailand. Kamboja tidak menginginkan kuil Preah vihear menjadi warisan dunia dari Thailand dan Kamboja sebab tidak ada pelanggaran kedaulatan Negaranya. Hal inilah yang memicu eskalasi konflik bagi kedua Negara dalam penulisannya ternyata Rosita Dewi menjelaskan faktor lain seperti adanya situasi politik domestik Thailand.Kelompok Nasionalis Thailand menggunakan isu Preah Vihear untuk menggulingkan Predana Menteri Samak Sundarajev. Akan tetapi dalam tulisan Rosita Dewi hanya sedikit menjelaskan situasi domestik Thailand.

Masih berkaitan mengenai konflik yang kembali muncul antara Thailand dan Kamboja menurut Kyaw Moe Tun (2011, pp. 27-28), konflik yang terjadi kini klaim atas wilayah yang berada di sekitar kuil Preah Vihear 4,6 kilometer persegi. Perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung telah menyebabkan terjadinya pertarungan antara kedua militer tersebut, yang mengakibatkan korban manusia, pengungsian manusia, penghancuran harta benda dan kehidupan sehari-hari dari penduduk yang tinggal di sepanjang daerah perbatasan dan penutupan gerbang perbatasan.Penduduk yang tinggal di sekitar zona konflik segera dievakuasi. Penduduk tersebut merupakan warga dari kedua belah pihak. Bentrokan tersebut juga mengakibatkan kerusakan material pada kuil Preah Vihear. Didalam artikel ini juga menjelaskan, bahwa adanya faktor domestik dari kedua Negara yang mempengaruhi terhadap

konflik Preah Vihear. Perdana menteri Hun Sen dengan partainyaCambodian People Party (CPP)dengan mendaftarkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia merupakan salah satu penghargaan dalam pemerintahannya dan akan menguatkan partainya. Kemudian disisi Thailand dalam artikel ini akan menambah infomasi untuk analisis peneliti,PAD menuduh pemerintah gagal mempertahankan wilayah nasional. Pada bulan Januari 2011, PAD menyelenggarakan demonstrasi besar yang berfokus pada isu Kuil Preah Vihear dan meminta pemerintah untuk membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamboja mengenai batas wilayah yang ditandatangani.

Menurut Irewati(2015, hal. 170-188), proses penyelesaian konflik antara kedua Negara ini melibatkan organisasi regional ASEAN.Oganisasi ASEAN sebagai pihak ketiga antara Thailand dan Kamboja. Peran ASEAN dalam keterlibatannya antara konflik Kamboja dan Thailand sangat dibutuhkan, selain sebagai pihak ketiga antara kedua Negara ASEAN dituntut untuk meredam konflik yang terjadi. Dalam forum ASEAN Foreign Ministers Meeting berhasil mempertemukan Thailand dan Kamboja. Dari pertemuan tersebut kedua Negara sepakat untuk menghadiri forum JBCyang dilakasanakan di Bogor pada April 2011. Hasil dari pertemuan ini adalah berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa. Hasil putusan tersebut disambut hangat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, berbeda dengan Prawit Wongsuwun yaitu menteri pertahanan Thailand yang menyetakan tidak akan menghadiri JBC tersebut dan menolak adanya kehadiran tim pemantau dari Indonesia serta tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak

ketiga. Maka dengan tindakan sepihaknya Kamboja melaporkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional PBB akan tetapi, PBB merujuknya kembali ke ASEAN dan akhirnya putusan dari ASEAN disetujui oleh PBB untuk mengirim tim pematau di area berkonflik tersebut dan kedua Negara harus mengikuti putusan tersebut. Tindakan berikutnya yang diambil oleh Kamboja adalah dengan meminta ulang atas intepretasi putusan ICJ tahun 1962 terhadap wilayah Preah Vihear.

Dalam tulisannya Kurniawan (2017, hal. 1121-1126)*Decision Making Theory* mampu menganalisis alasan Rusia menjadi pengamat Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hal yang melatar belakangi Rusia menjadi pengamat OKI merupakan salah satu cara untuk memperbaiki citra Rusia di mata internasionaldalam konflik Chechnya, Dagestan, dan berbagai kebijakan pemerintah Rusia yang cenderung mendiskriminasikan umat Muslim Rusia menghasilkan pandangan yang begitu buruk bagi Rusia. Upaya Rusia untuk memperbaiki citra buruknya di dunia Internasional, Rusia berusaha membangun pengaruhnya terutama di negara-negara yang dianggap sebagai potensi kekuatan baru di dunia Internasional. Dalam hal ini Rusia ingin memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota OKI yang didominasi oleh negara-negara Islam. Presiden Vladimir Putin sadar akan besarnya jumlah dari masyarakat Islam di Negaranya. Hal ini yang membuat berusaha untuk lebih melibatkan mereka dengan berbagai kegiatan yang ada di Rusia baik secara nasional maupun internasional. Sehingga umat Islam Rusia merasa memiliki peran penting. Putin menempuh sejumlah langkah dalam kebijakannya mengenai pro Islam di Rusia, diantaranya dengan melakukan

dukungannya dalam pengembangan tempat ibadah, pendidikan Islam di Rusia, adanya pembentukanlembaga atau organisasi yang guna menaungi umat muslim di Rusia. Bahkan pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan pejabat Muslim dalam kabinetnya yaitu Benjamin Popov diangkat sebagai sebagai duta yang diutus pemerintah untuk tugas khusus ke berbagai Negara. Hal ini dilakukan tentunya untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat Rusia yang kemudian kebijakan tersebut dapat dukungan penuh dari masyarakat.Melalui, penjelasan mengenai penerapan dari teori*decision making*dalam kasus Rusia, peneliti akan menjadikan tulisan ini sebagai acuan yang mana cara untuk mengaplikasikan teori*decision making* pada kasus wilayah sekitar Preah Vihear.

1.7 Landasan Teori/Konsep atau Pendekatan

Decision Making Theory dari Richard Snyder, H. W Bruck dan Burton(Snyder, 1962, hal. 203)memberikan penggambaran mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan.Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari Negara.Pembentukan pengambilan keputusan akan dipengaruhioleh berbagai factor, yaitu faktor internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional.Sementara faktor eksternal yang meliputi dari adanya situasi dan kondisi di luar Negara seperti aksi dan reaksi dari Negara lain.

Rational Choice Model

Kondisi domestik Negara dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi kebijakan luar Negeri suatu Negara. Pengambilan keputusan adalah proses memilih prinsip, pendekatan, metode implementasi untuk mencapai tujuan di mana pengaruh dari partai politik, pemimpin suatu Negara melakukan kegiatan untuk tujuandan arahan kegiatan. Salah satu model utamanya adalah model pilihan rasional yang didasarkan pada pelaku individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuanuntuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara(Xing, 2015, hal. 42). Artinya, partai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal. Para pihak akan responsif terhadap perubahan opini publik, dan mungkin enggan untuk berkomitmen terlalu kuat terhadap kebijakan tertentu, jika terjadi perubahan opini public(Derouen, 2010, p. 62).

Selaras dengan Ahmed Aref Kafarneh (Kafarneh, 2013, hal. 62-70), yang dimaksud dari Pengambilan Keputusan merupakan aspek penting dari tanggung jawab pemerintah. Faktor internal seperti politik domestik mempengaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik yang memungkinkan banyakmenyoroti peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam pemerintahandan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Pengambil keputusan dipengaruhi oleh program partai tersebut dan prinsip-prinsipnyaseperti, Negara yang hanya memiliki satu partai seringkali berada

dalam kebijakan luar negeri yang sangat kuat dan memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Apabila pola internal menunjukkan hubungan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem domestik, maka berbeda dengan Negara dalam sistem internasional.Pada level analisis domestik adanya kelompok masyarakat menekan pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil sedangkan level internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Artinya bahwa kebijakan luar negri suatu Negara bisa mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional. Pertimbangan mengenai tekanandari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A(Kamps, 2005, p. 23).

Melalui teori*decision making* akan memberikan penjelasan mengenai pengambilan kebijakan luar negeri Thailand dalam permasalahan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Seperti yang telah dijelaskan sedikit pada latar belakang bahwa kondisi domestik politik Thailand yang tidak stabil dengan adanya kebangkitan dari gerakan Nasionalis dan persaingan politik, lalu adanya kebijakan dari Kamboja dengan mendaftarkan Preah Vihear sebagai warisan dunia membuat Thailand mengambil keputusan dengan memunculkan kembali isu Preah Vihear serta penempatan militernya di perbatasan karena khawatir dari pendaftaran tersebut akan mempengaruhi garis batas Negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode peneliatian yang digunakan untuk mengkaji mengenai konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja adalah dengan menggunakan metode dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganlisa persepsi, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Melalui beberapa deskripsi yang digunakan tujuannya untuk menemukan penjelasan yang akan mngarahkan pada kesimpulan (Hamdi, 2014, hal. 18). Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatuserta berusaha untuk membuat deskripsi yangsesuai dengan yang dipersepsikan oleh subyek. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna memahami dari situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis hingga teori (Sugiyono, 2009, hal. 15-20).

1.8.2 Subjek Penelitian

Konflik yang terjadi antara kedua Negara ASEAN yaitu Thailand dan Kamboja mengenai wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang menjadi isu internasional. Masing-masing dari pihak Thailand dan Kamboja menggunakan penggambaran peta perbatasan yang berbeda. Pada sisi Thailand, munculnya isu ini dikarenakan adanya domestik politik Thailand yang tidak stabil. Proses penyelesaiannya memerlukan bantuan pihak ketiga seperti organisasi ASEAN dan ICJ.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada tulisan ini akan menggunakan library research atau kepustakaan yang dapat digunakan untuk membedakan hal yang telah dilakukan dan hal lain yang perlu diulas kembali atau ditambahkan pada penelitian selanjutnya(Daymon, 2007, hal. 55-60).

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini proses yang akan dilakukan adalah proses analisis, dari sumber data yang didapatkan melalui teknik library search akan diolah kemudian dianalisis untuk melihat permasalahan mengenai munculnya kembali konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Melalui proses analisis tersebut akan ditemukan berupa kesimpulan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti

BAB II

KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR PADA TAHUN 2008

Thailand dan Kamboja memiliki perspektif yang berbeda atas penggambaran batas-batas dari wilayahnya khususnya mengenai batas dari wilayahnya kuil Preah Vihear.Kuil Preah Vihear merupakan kuil cerminan dari agama hindu yang dibangun sejak abad ke 11 yang menjadi penyebab munculnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah terjadi sudah sejak lama. Konflik tersebut terselesaikan oleh pihak ICJ sebagai pihak ketiga. Pada tahun 1962, setelah putusan ICJ mengenai konflik perbatasan kedua Negara sepakat untuk tidak mengungkit kembali mengenai perbatasan kuil Preah Vihear.Pada Bab ini penulis akan menjabarkan hal yang memicu konflik ini muncul kembali, hingga proses penyelesaian konflik yang terjadi. Ketika kuil Preah Vihear diberikan status sebagai warisan dunia pada tahun 2008, ternyata membawa perubahan yang baru terhadap hubungan Thailand dan Kamboja. Hubungan kedua Negara sempat menegang dalam beberapa tahun dan kembali membahas konflik perbatasan kuil Preah Vihear.Konflik yang terjadi sebenarnya tidak lepas dari sejarah masa lalu mengenai wilayak kuil Preah Vihear bagi kedua Negara.

2.1 Pendaftaran Kuil Preah Vihear sebagai Warisan Dunia 2008

Thailand dan Kamboja mengenai isu perbatasan kuil Preah Vihear bukan hanya terjadi pada tahun 2008 saja, tetapi sudah terjadi ketika Perancis mengkolonialisasi Kamboja. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja

sebenarnya sudah selesai oleh pihak ICJ ditahun 1962. Putusan yang dibuat oleh ICJ di tahun 1962 tersebut membuat kuil Preah Vihear termasuk kedalam kedaulatan Kamboja. Selama beberapa tahun kedua Negara tidak pernah lagi membahas konflik perbatasan. Akan tetapi, pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO sebagai warisan dunia merupakan tahap baru untuk hubungan Thailand dan Kamboja mengenai isu perbatasan. Pendaftaran kuil Preah Vihear telah di persiapkan oleh Kamboja dari beberapa tahun lalu, yaitu pada Oktober 2001. Kamboja telah membuat proposal yang akan mendaftarkan kuil Preah Vihear agar di nobatkan sebagai warisan dunia dari Kamboja pada tahun 2008 (Tun, 2011, hal. 22). Kuil Preah Vihear secara kultural dan *historis* bagi orang Kamboja memandang kuil ini sebagai ikon kemegahan budaya dari Kerajaan Khmer Merah. Kuil Preah Vihear melambangkan sejarah Kamboja yang berfungsi sebagai representasi identitas nasional. Kuil Preah Vihear mencakup unsur-unsur agama Hindu yang merupakan agama dari raja-raja Khmer pada saat itu(Wong, 2013, hal. 22).

Pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia merupakan representatif atas Negara Kamboja dengan sejarah dari Khmer Merah tetapi inisiatif dari pendaftaran tersebut mendapat reaksi negatif dari pihak Thailand, karena pada awalnya proses pendaftaran terjadi tanpa persetujuan dari pemerintah Thailand serta belum pernah dibicarakan sebelumnya (Dewi, 2013, hal. 6). Kedua belah pihak baru akan melakukan proses pembicaraan mengenai pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia yang akan dilakukan pada April sampai dengan Juni 2008 (Wagener, 2011, hal. 32).

Pada awalnya, pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Samak Sundarajev memberikan dukungannya terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia pada tahun 2008 hanya jika tidak mengganggu dengan daerah perbatasan Thailand di sekitar area kuil Preah Vihear karna dekat dengan perbatasan Thailand. Kemudian pada 22 Mei 2008, Noppadon Pattama sebagai Menteri Luar Negeri Thailand melakukan tugasnya dengan menghadiri pertemuan dengan pihak Kamboja dan UNESCO untuk membicarakan pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di Paris.Melaui pertemuan tersebut telah memperlihatkan bahwa Thailand sepenuhnya mendukung atas pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai daftar dari wairsan dunia di tahun 2008. Hasil dari pertemuan itu juga berupa penanda tanganan dari Noppadon Pattama atas dukungan Thailand terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008 (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 68).

Thailand harus mengambil konsekuensi terhadap kebijakan dengan menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008 yang berdampak pada situasi politik domestik Negaranya. Isu kuil Preah Vihear ini dimanfaat kan oleh partai oposisi yaitu Partai Demokrat serta diiringi dengan kebangkitan dari gerakan nasionalis PADThailand yang tidak menyetujui dan mereka menolak kebijakan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Samak Sundarajev. Isu mengenai perbatasan kuil Preah Vihear digunakan oleh pihak mereka dengan menuduh bahwa pemerintah telah menjual tanah Negara kepada pihak Kamboja. Tanah yang dimaksud oleh pihak PAD adalah tanah seluas 4.6 kilometer persegi. Wilayah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang berada di sekitar area wilayah kuil Preah Vihear. Bahkan Noppadon Pattama disebut oleh

PAD sebagai penghianat karna sudah menanda tangani persetujuan atas kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008 (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 68).

Bukan hanya itu, PAD juga menilai Noppadon dan Perdana Menteri Samak memiliki konsesi bisnis di Kamboja dalam persetujuaanya mengenai pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008. Gerakan nasionalis PAD berdemonstrasi di dekat kuil Preah Vihear yang menyebabkan situasi kacau di daerah perbatasan kuil Preah Vihear. Partai Demokrat sebagai partai oposisi mendukung gerakan nasionalis PAD dalam proses demonstrasi yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Samak pada saat itu. Bahkan dalam demonstrasi tersebut ada dari beberapa partai Demokrat yang ikut turun ke jalan bergabung dengan PAD (Wong, 2013, hal. 24). Di bawah tekanan publik yang sangat tinggi akhirnya Samak Sundarajev harus mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Thailand di tahun 2008, lalu digantikan oleh Somachai Wongsawat. Pergantian Perdana Menteri tidak membuat PAD berhenti dalam melakukan demonstrasi bahkan mereka terus menerus berdemonstrasi dengan menduduki gedung pemerintahan dan akhirnya Somachai juga mundur dari jabatan yang tidak terlalu lama itu (Wiguna, 2011, hal. 2).

Berita menegenai perbatasan kuil Preah Vihear yang terus dihembuskan oleh gerakan nasionalis telah berhasil membuat Samak Sundarajev mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Sebab, isu perbatasan terus di sebarkan untuk membangkitkan rasa nasionalis masyarakat di Thailand sehingga demosntran terus memprotes kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Samak. Lengsernya Samak Sundarajev dan Somachai dari jabatannya berhasil membuat partai oposisi merebut kekuasaanya dan naik menjadi perdana menteri yang baru

yaitu Abhisit Vejjajjiva (Dewi, 2013, hal. 6). Pada 22 hingga 25 Juni 2008, terjadi perdebatan di parlemen Thailand. Perdebatan tersebut di pimpin oleh Abhisit Vejjajjiva sebagai pemimpin dari partai oposisi Demokrat. Abhisit menyampaikan pendapatnya kepada seluruh anggota di parlemen yang menganggap bahwa Abhisit sebagai warga Thai asli meminta agar seluruh anggota parlemen segera memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintahan pada saat itu. Hasilnya adalah, Abhisit Vejjajjiva terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand melalui pemungutan suara di parlemen Thailand(Prasetyo, 2012, hal. 4).

Thailand dalam pergantian perdana menterinya memiliki kebijakan yang berbeda mengenai isu perbatasan kuil Preah Vihear. Berbeda dengan Samak dalam kebijakannya mengenai kuil Preah Vihear, apabila pemerintahan Samak menyetujui proses pendaftaran serta Noppadon Pattama selaku Menteri Luar Negeri menanda tangani atas dukungan Thailand terhadap kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia tahun 2008, sementara menurut Abhisit dengan adanya putusan UNESCO yang akan menetapkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia akan memperburuk hubungannya dengan Kamboja. Disisi lain, Abhisit juga menggunakan motif *historis* atas teritori Thailand. Motif teritori mengenai kuil Preah Vihear di masa lalu yang mana kuil Preah Vihear pernah menjadi bagian dari wilayah Thailand. Melalui motif *historis* itu membuat semakin banyaknya masyarakat Thailand untuk mendukung atas kebijakannya, yang menjadikan pemerintah Thailand akan semakin *concern* atau menjadi tuntutan untuk membahas perbatasan kuil Preah Vihear (Wagener, 2011, hal. 44). Setelah beberapa bulan Abhisit sebagai Perdana Menteri, lalu terjadi baku tembak antar

kedua Negara di sepanjang perbatasan Kuil Preah Vihear (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 70).

Abhisit melalui kebijakannya ingin mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dengan mencoba membangkitkan kembali rasa nasionalis masyarakat Thailand dengan menggunakan motif *historis* yang tentunya dampaknya akan membuat kuat pemerintahannya pada masa itu dengan memperoleh dukungan penuh masyarakat Thailand. Hal tersebut relatif berhasil karna dengan semakin luasnya menyebar isu dari perbatasan wilayah sekitar kuil Preah Vihear berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan Abhisit naik sebagai Perdana Menteri yang baru untuk Thailand, kejadian ini juga di dukung melalui bangkitnya gerakan nasionalis Thailand yang menginginkan pemerintah harus memperjuangkan tanah yang di sengketakan dengan Kamboja, maka dengan itu pemerintah Thailand menjadikan fokus isu perbatasan dengan Kamboja di tahun 2008. Pemerintah Abhisit ini berkontribusi untuk memperpanjang konflik di Preah Vihear dengan adanya sentimen dari nasionalis ini juga berhasil dalam mempertemukan Thailand dengan Kamboja pada pertempuran militer kedua Negara dengan membangun militer di sepanjang perbatasan wilayah kuil Preah Vihear. Bagaimanapun politik domestik Thailand berdampak sangat signifikan terhadap isu perbatasan kuil Preah Vihear serta hubungan kedua Negara di tahun 2008.

2.2 Penolakan Thailand terhadapan putusan UNESCO 2008

Konflik yang sebenarnya terjadi adalah kedua Negara memiliki perspektif yang berbeda mengenai batas wilayah dari Negaranya masing-masing, khususnya mengenai wilayah kuil Preah Vihear. Pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO

sebagai warisan dunia adalah tahap baru mengenai hubungan Thailand dan Kamboja. Putusan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia mendapat reaksi negatif dari Thailand. Disisi lain, kemunculan dari konflik perbatasan ini mewakili dari situasi dan kondisi politik domestik Thailand yang pada awal kebijakannya menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dengan syarat tidak mengganggu wilayah yang di sengeketan. Akan tetapi, yang terjadi adalah demonstran Thailand yang menolak kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia sehingga pemerintah Thailand mendapat tekanan dari domestiknya pada saat itu. Akhirnya karna tekanan dari domestik tersebut, pemerintah Thailand mencoba memprotes hal inipadaUNESCO.

Thailand mengatakan perselisihan itu muncul karena pemerintah Kamboja menggunakan peta yang dibuat selama koloni Perancis di Kamboja di mana penetapan yang didasarkan pada peta yang dibuat pada tahun 1904-1907 ini dianggap tidak sah oleh Thailand karena peta ini hanya dibuat secara sepihak oleh Perancis. Thailand beranggapan bahwa, apabila menggunakan garis DAS yang benar dalam penetapan garis batas seharusnya kuil Preah Vihear masuk ke dalam daerah kedaulatan Thailand. Thailand juga menganggap kuil tersebut bukan milik Kamboja, karena wilayah tersebut dibuat tidak berdasarkan peta yang sesungguhnya pada zaman kolonial Perancis (Shadbolt, 2013). Kemudian, asumsi lain dari Thailand juga beranggapan bahwa perginya Perancis dari Kamboja maka berakhir pula perjanjian peta perbatasan yang dibuat semasa kolonial di tahun 1904-1907 (Dewi, 2013, hal. 3). Pada saat itu, garis batas melencengdari garis DAS yang diatur dalam Pasal 1 dari Perjanjian 1904. Penyimpanganmembuat seluruh tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear

kedalam wilayah Kamboja. Akan tetapi dengan merdekanya Kamboja dan perginya Perancis maka menurut Thailand perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bukan hanya itu, Thailand dalam penolakannya terhadap usulan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dianggap akan merugikan pihaknya, karena hal itu dinilai akan melanggar kedaulatan Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar kuil Preah Vihear. Tanah yang dituntut oleh pihak Thailand adalah tanah seluas 4.6 kilometer persegi di daerah kuil Preah Vihear. Konflik perbatasan mengenai kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja bukan hanya terjadi pada 2008 tetapi sudah terjadi sejak Perancis mengkolonisasi Kamboja. Akan tetapi konflik ini sebenarnya telah selesai oleh pihak ICJ. Menurut putusan ICJ pada tahun 1962, kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja. Namun, keputusan itu tidak menutupi area 4.6 kilometer yang mengelilingi kuil Preah Vihear yang sampai saat ini belum ditentukan(Dewi, 2013, hal. 6). Konflik Thailand dan Kamboja merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan persepsi dimana yang menjadi pokok permasalahannya adalah wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang belum dilibatkan pada putusan ICJ ditahun 1962. Thailand berasumsi bahwa area yang belum diketahui kepemilikannya tersebut termasuk area bagian ke dalam daerah Kantharalak, Si Sa Ket, Thailand (ICJ ruling on Preah Vihear Nov 2011, 2013).

Thailand juga menolak putusan UNESCO dengan menobatkan kuil Preah Vihear sebagaiwarisan dunia dari Kamboja. Dengan mendapat status kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dari Kamboja tentunya hal ini membuat sukses pemerintah Kamboja dalam membawa perhatian positif dari internasional serta

penggambaran dari Kamboja dengan menggunakan warisan dunia yang gunanya untuk mempromosikan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008 sebagai simbol budaya dan agama dari Kamboja. Adapun alasan dari penolakan yang dilakukan oleh Thailand ialah karena Thailand menganggap bahwa kuil ini bukan milik Kamboja saja, karena bukan hanya masyarakat Kamboja yang melakukan ibadah di dalam kuil Preah Vihear namun masyarakat Thailand yang hidup di sekitar kuil ini juga beribadah di kuil tersebut. Selain itu, area pintu masuk kuil terbuka ke utara dengan akses mudah dari Thailand, dan Thailand menganggap bahwa itu dibangun untuk sebagai situs ibadah untuk Thailand(Wong, 2013, hal. 22).

Thailand meminta agar UNESCO meninjau kembali keputusannya terkait penetapan kuil Preah Vihear. Namun,UNESCO menolak permintaan Thailand karena keputusan tersebut sudah dianggap sah untuk menetapkan kuil Preah Vihear masuk dalam kedaulatan Kamboja. Sangat jelas bahwa mengapa wilayah perbatasan ini diperebutkan oleh kedua Negara selain memiliki situs dan nilai bersejarah serta sebagai tempat peribadatan bagi masyarakat sekitar baik Kamboja dan Thailand. Bagi Thailand kuil Preah Vihear juga untuk mempomosikan nasionalisme, budaya dan agama yang juga mendominasi di Negaranya tersbut. Jadi hal ini yang membuat Thailand merasa keberatan akan putusan UNESCO di tahun 2008.

2.3 Penempatan militer Thailand-Kamboja di wilayah Kuil Preah Vihear

Pada 7 Juli 2008, UNESCO secara resmi menobatkan bahwa kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008.Maka pihak Kamboja tentunya merasa bangga akan hal tersebut. Berbeda dengan perayaan yang ada di Thailand. Situasi

domestik Thailand mulai tidak stabil, hanya seminggu setelah kuil Preah Vihear di nobatkan sebagai warisan dunia 2008, pihak Kamboja mendapatkan tiga pengunjuk rasa Thailand yang menyebrangi wilayah yang dipersengketakan, kemudian pada tanggal yang sama yaitu 15 Juli 2008, pihak Kamboja mengklaim 40 tentara Thailand memasuki wilayah Kamboja berada di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear (Head, 2018). Kemudian, pihak Kamboja mulai menutup akses Thailand ke kuil Preah Vihear. Hal ini dilakukan oleh pihak Kamboja tentunya untuk melindungi kedaulatan Negaranya.

Pemerintah Kamboja mencoba untuk memperingati kejadian tersebut terhadap Thailand tetapi Thailand menganggap bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi kedaulatan Negaranya atau tanah yang dekat dengan perbatasan dengan Kamboja. Kamboja juga menempatkan militernya di wilayah kuil Preah Vihear. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kamboja dalam membela kedaulatannya. Kemudian, beberapa ribu tentara mulai berjaga-jaga di daerah wilayah kuil Preah Vihear dari pihak Thailand dan Kamboja. Diperkirakan Thailand dalam penempatan militernya di area kuil Preah Vihear memiliki 2.000 tentara sedangkan Kamboja lebih dari 3.000 tentara (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 70). Hasilnya adalah pertempuran tentara pertama kali dari kedua belah pihak yang ada di sekitar kuil Preah Vihear pada Oktober 2008. Perkembangan ini menghasilkan situasi yang semakin berbahaya yang mana berubah menjadi adu baku tembak antar militer kedua Negara. Bahkan pertempuran senjata semakin berlanjut di tahun selanjutnya pada April 2009 yang membuat 2 dari tentara Thailand dan Kamboja meninggal dan beberapa terluka (Wagener, 2011, hal. 23).

Bentrokan militer kedua Negara terus terjadi lagi pada Januari 2010, April 2010, dan Juni 2010 yang pada saat itu telah menghilangkan nyawa sebanyak 8 tentara dari pihak Thailand. Kemudian antara 4 dan 7 Februari 2011 pertempuran senjata terjadi lagi.yang membunuh 2 tentara Thailand, 1 masyarakat sipil dan 3 tentara Kamboja. Konflik perbatasan antara kedua Negara semakin jauh, pada April 2011 kabarnya militer dari kedua belah pihak bentrok kembali di daerah perbatasan serta membunuh 4 tentara Thailand dan 3 dari tentara Kamboja. (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 73-74). Akibat dari bentrokan yang telah dilakukan oleh kedua Negara berdampak pada melenyapkan nyawa dari tentara kedua belah pihak yang bersengketa serta menewaskan masyarakat sipil, pengungsian manusia hingga penghancuran harta benda dari masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah perbatasan kuil Preah Vihear.Bentrokan tersebut juga mengakibatkan kerusakan material pada kuil Preah Vihear (Tun, 2011, hal. 26).

Pertempuran militer itu ternyata juga hasil dari ketidakstabilan dari politik domestik Thailand. Gerakan nasionalis PAD sengaja mendesak militer Thailand untuk campur tangan dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja maka hal ini memungkinkan militer untuk membangun kembali budaya politik lama di Thailand yang di mana menggunakan kontrol kuat militer atas kekuasaan sipil khususnya dalam urusan luar negeri (Chachavalpongpun P. , 2013, hal. 73). PAD dalam desakannya terhadap militer sangat efektif, faktanya konflik tersebut terus berlanjut cukup lama dengan kejadian baku tembak antar kedua Negara.

Pemerintah Thailand dan Kamboja seharusnya dengan adanya korban hingga menimbulkan kehancuran kuilmenyadari akan pentingnya resolusi konflik terhadap sengekta perbatasan dan harus segera dilakukan agar bisa meredam

konflik dengan menjadi gencatan senjata. Kedua Negara secara tidak langsung telah dirugikan dalam konflik ini karena harus mengorbankan para tentaranya, memberi pengungsi bantuan makan dan menyediakan tempat tinggal yang aman. Pada tahun 2011 yang mana kedua Negara masih adu baku tembak antar militernya mendapat reaksi dari PBB dan mengutuk serta meminta kepada Thailand dan Kamboja untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik yang terjadi. Ban Ki Moon selaku sekretariat PBB pada saat itu sangat optimis mengenai perdamaian antar kedua Negara karena Thailand dan Kamboja saling menyalahkan satu sama lain atas bentrokan yang terjadi di wilayah kuil Preah Vihear. Bahkan pihak UNESCO juga mengirim utusan untuk bertemu dengan Perdana Menteri dari Thailand dan Kamboja untuk mendiskusikan pengamanan atas warisan dunia kuil Preah Vihear dan meminta agar kedua belah pihak harus menjaga kuil Preah Vihear (Wong, 2013, hal. 24)

2.5 Proses Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja

Keputusan UNESCO mengenai kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia mendapat reaksi negatif dari Thailand. Hal ini juga berdampak bagi hubungan antar kedua Negara yang menegang mengenai konflik perbatasan wilayah kuil Preah Vihear. Kedua Negara telah mendapat tekanan dari internasional untuk segera menyelesaikan masalahnya tersebut. Berbagai proses penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja seperti diplomasi bilateral, ataupun multilateral secara regional melalui ASEAN hingga proses multilateral internasional melalui PBB dan ICJ telah dilewati dengan baik.

Pada awalnya Thailand lebih menginginkan bahwa konflik yang terjadi ini akan lebih mudah di selesaikan melalui bilateral sementara pihak Kamboja lebih

percaya bahwa keterlibatan dari ASEAN dan ICJ lebih berperan aktif untuk menengahi konflik yang terjadi. Keterkaitan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik yang terjadi seperti adanya organisasi regional maupun internasional tentunya akan mempengaruhi preferensi dari kedua Negara. Sebelum proses ikut campurnya pihak ketiga terhadap penyelesaian konflik perbatasan wilayah kuil Preah Vihear kedua Negara tentunya telah melakukan dialog terlebih dahulu. Seperti dalam hal negosiasi yang dilakukan oleh kedua Negara. Negosiasi tersebut dibagi menjadi dua: (Raharjo S. N., 2013, hal. 116-117):

1. Negosiasi antar Perdana Menteri (21 Juli 2008)

   Kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing mengirim utusan dengan harapan bahwa konflik ini akan terselesaikan dengan cepat. Perwakilan dari Thailand adalah Perdana Menteri Samak Sundarajav, sedangkan dari Kamboja Perdana Menteri Hun Sen. Negosiasi itu dilakukan di Kota Seam Reap wilayah Kamboja Utara. Hasilnya adalah kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik militernya dari seoanjang wilayah kuil Preah Vihear.

2. Negosiasi antar Panglima Tertinggi Thailand dan Menteri Pertahanan Kamboja (18-19 Agustus 2008)

   Boonsrang Niumpradit adalah panglima tertinggi Thailand yang mengadakan negosiasi dengan Tea Banh sebagai Menteri Pertahanan Kamboja. Bonsang ditugaskan oleh Perdana Menteri Samak sebagai perwakilan Thailand pada sindang pertemuan komisi perbatasan Thailand dan Kamboja.Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan perbatasan dalam upaya menyelsaikan konflik yang terjadi. Akan tetapi

sebelum pertemuan itu berlangsung baku tembak antar militer dari kedua Negara terjadi pada 3 dan 15 Oktober 2008. Maka konflik ini tidak menemui titik terang atau tidak menemukan garis final dalam proses bilateral untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Kamboja adalah dengan meminta keterlibatan ASEAN untuk mengkahiri konflik Negaranya dengan Thailand. Dalam forum ASEAN *Foreign Ministers Meeting* berhasil mempertemukan Thailand dan Kamboja. Dari pertemuan tersebut kedua Negara sepakat untuk menghadiri forum JBC yang dilaksanakan di Bogor pada April 2011. Hasil dari pertemuan ini adalah berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa. Hasil putusan tersebut disambut hangat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, berbeda dengan Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan yang menyatakan menolak kehadiran tim pemantau dari Indonesia atau campur tangan luar(Dewi, 2013, hal. 10).

Kamboja sangat tidak puas dengan hasil yang di dapatinya melalui proses bilateral dengan Thailand. Bahkan keterkaitan ASEAN dalam konflik yang terjadi masih belum terlihat atas perubahan yang signifikan bagi hubungan Thailand dan Kamboja. Kemudian Kamboja dengan tindakan sepihaknya melaporkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional PBB akan tetapi, PBB merujuknya kembali ke ASEAN agar proses penyelesaian ini terselesaikan melalui proses regional. Pada 18 Juli 2011, PBB mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa perlunya atas penarikan mundur militer dari kedua pihak yang bersengketa dan menghentikan baku tembak serta kedua negara

harus menerima adanya tim pemantau dari Indonesia. Kedua Negara juga harus mengikuti proses mediasinya dengan ASEAN serta menahan aktivitas atau tindakan yang akan memperburuk situasi (Irewati, 2015, hal. 170-188).

Thailand dan Kamboja dalam mekanisme pernyelesaian sengketa pertama yang diambil adalah melalui negosiasi bilateral. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil yang baik dalam proses untuk mengakhiri konflik perbatasan kuil Preah Vihear, maka proses penyelesaian mulai melibatkan pihak ketiga. Melalui putusan dari PBB yang menyatakan bahwa kedua Negara harus mengikuti proses penyelesaian melalui ASEAN maka perintah tersebut harus ditaati oleh kedua Negara. Dalam sengketa yang hanya melibatkan Negara anggota ASEAN, pihak bersengketa bisa meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pihak ketiga untuk menyediakan(Raharjo S. N., 2013, hal. 111):

1. *Good offices*, yang mana pihak ketiga diminta untuk membujuk negara yang bertikai agar mau menegosiasikan penyelesaian secara damai
2. Konsiliasi, yang mana pihak ketiga mempertimbangkan semua elemen sengketa dan secara formal mengajukan saran penyelesaian
3. Mediasi, yang mana Negara yang bertikai mengundang pihak ketiga untuk mempengaruhi persepsi atau perilaku serta memberikan peran yang lebih aktif dalam proses negosiasi.

Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN menyikapi konflik yang terjadi pada anggota ASEAN dan bersedia sebagai pihak ketiga antara kedua Negara. Pada saat itu Indonesia bertindak sebagai mediator, dengan misinya untuk meredam konflik yang terjadi. Indonesia menggunakan metode dari *shuttle*

diplomacy yang di bantu oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan proses mediasi dengan cara mengunjungi kedua belah pihak secara terpisah terlebih dahulu. Marty Natalegawa ini melakukan kunjungan tentunya untuk membicarakan misi perdamaian di perbatasan kuil Preah Vihear serta pengiriman tim pemantau dari Indonesia di perbatasan kuil Preah Vihear. Kemudian, karna proses pengiriman tim pemantau telah di setujui serta penarikan militer dari kedua belah pihak maka proses tersebut mulai dilakukan dan di awasi oleh Menteri Pertahanan Sukumpol Suwanatat pihak Kamboja dan panglima militer Prayuth Chanocha dari pihak Thailand. Penarikan tersebut meliputi zona yang mencakup kuil Preah Vihear dan area seluas 4,6 kilometer persegi, yang kepemilikannya diklaim oleh kedua Negara (Troops pulled from Preah Vihear, 2012).

Kamboja dalam usahanya membela kedaulatannya bukan hanya meminta bantuan ASEAN tetapi juga mahkamah internasional PBB. Melalui proses mediasi regional dan internasional Kamboja dan Thailand menemui titik terang untuk menghentikan konflik yang terjadi. Kamboja tidak berhenti melalui mediasi yang telah dilakukan itu, dalam tindakan berikutnya adalah dengan meminta ulang atas intepretasi mengenaiputusan ICJ di tahun 1962 terhadap wilayah perbatasan kuil Preah Vihear. Lalu, ICJ menerima permintaan Kamboja atas permintaannya untuk intepretasi ulang mengenai keputusan ICJ di tahun 1962 dalam perbatasan kuil Preah Vihear. Hal ini dilakukan oleh Kamboja karena Thailand menganggap keputusan ICJ pada tahun 1962, yang membenarkan bahwa kuil Preah Vihear memang bagian dari kedaulatan Kamboja tetapi bukan pada tanah yang di sekitar kuil Preah Vihear. Wilayah sekitar yang dituntut Thailand adalah tanah 4.6

kilometer persegi yang membuat kedua Negara kembali membahas isu perbatasan. Kemudian, putusan hasil intepretasi dari ICJ dikeluarkan di tahun 2013 yaitu menyatakan bahwa Thailand harus menghormati teritorial Kamboja dengan menarik seluruh militernya mundur dari sepanjang wilayah sepanjang kuil Preah Vihear.

Putusan dari ICJ di tahun 2013 juga meminta Thailand dan Kamboja harus bekerja sama untuk melindungi situs warisan dunia dari UNESCO, kedua Negara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang disengaja dapat merusak kuil Preah Vihear (ICJ, 2013, hal. 283). Disamping itu, setelah putusan ini dikeluarkan kedua Negara wajib mematuhinya dan pemahaman atas wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang dituntut oleh pihak Thailand sudah terlihat jelas bahwa intepretasi ulang dari putusan ICJ membuat kuil Preah Vihear beserta wilayah sekitarnya bermakna masuk kedalam kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menghormatinya.

BAB III

TEORI *DECISION MAKING*

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari teori*decision making*. Bab ini juga akan menjelaskan model dari teori*decision making* yang guna mengetahui tindakan atau sikap dari pembuat keputusan. Menurut Snyder pengertian teori*decision making*yang berasumsi bahwa melalui teori*decision making* akan mengetahui perilaku Negara dalam hubungan internasional. Snyder juga menjelaskan yang mana teori*decision maker* dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Hal ini juga yang menjadikan alasan mengapa diambilnya kebijakan luar negeri suatu Negara.

3.1 Prospek dari teori *Decision Making*

Decision Making (pengambilan keputusan), muncul pada 1950-an di Amerika Serikat. Herbert A. Simon adalah orang pertama yang menggunakan konsep "pengambilan keputusan" dalam buku yang berjudul *Amninistrative behavior: A Study Of Decision Making Processes In Administrative Organization*telah terbit pada tahun 1947. Sejak saat itu, "pengambilan keputusan" telah banyak digunakan di seluruh dunia. Banyak ahli telah mengintepretasikan makna pengambilan keputusan dari perspektif yang berbeda. Beberapa percaya bahwa pengambilan keputusan adalah proses perbandingan dan seleksi atas pilihan-pilihan alternatif yang telah dibuat, pengambilan keputusan mengacu pada semua kegiatan di mana orang mencoba untuk menentukan tujuan dari perilaku, kemudian dalam bidang

politik pengambilan keputusan digunakan sebagai penggambaran untuk Negara dalam membuat suatu kebijakan (Xing, 2015, hal. 43).

Pengambilan keputusan menurut Robert Jervis (Teuku, 2002) :

> "Para pengambil keputusan cenderung memeliki persepsi yang bersifat agrosentris dalam mengintepretasikan keputusan-keputusan mereka sebagai respon dari kondisi-kondisi objektif, dalam hal ini kondisi lingkungan eksternal mereka dalam pembuatan keputusan akan bertindak dengan mempertimbangkan keputusannya, termasuk sistem politik nasional."

Selaras dengan Snyder, Bruck dan Sapin memliki perspektif mengenai teori*decision making* merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku Negara dalam hubungan internasional. *Decision making* memliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus di pertimbangkan oleh Negara. Faktor interaksi internal dan eksternal akan membentuk preferensi Negara pada pembuatan kebijakan luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan Negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan Negara lain serta situasi dunia. (Snyder, 1962, hal. 203).

Pembentukan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang ada di luar wilayah

Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia (Kurniawan, 2017, hal. 1121-1126). Faktor internal seperti politik domestik lebih mengacu situasi kondisi politik domestik salah satunya adalah peran partai politik yang memperngaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik yang memungkinkan banyak, menyoroti peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Partai politik berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara semaksimal mugkin (Xing, 2015, hal. 42).

Selain itu opini publik juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Opini publik sebagai ungkapan sejumlah besar pendapat dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa opini publik merupakan salah satu faktor terpenting yang ditetapkan oleh pengambil keputusan dalam perhitungan. Peran opini publik dalam proses ini di bawah sistem demokrasi, di mana ada kebebasan berekspresi yang lebih besar, namun kita harus memperhatikan hal yang penting, kebebasan yang terkait dengan ekspresi yang berbeda berarti bahwa opini publik berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, di bawah sistem ini dapat menyesatkan opini publik, yang bertujuan dengan diarahkan, diinginkan maka hal ini dapat disebut sebagai sistem informasi yang menyesatkan (Kafarneh, 2013, pp. 62-70). Opini publik dapat berperan aktif dengan adanya pemberitaan atau tulisan-tulisan di media yang bertujuan untuk membentuk para pembaca agar memiliki perpspektif yang diinginkan oleh

pembuat tulisan tersebut. maka dalam hal ini pembuat keputusan harus mempertimbangkannya, karena melalui tulisan serta pemberitaan yang telah dibuat memungkinkan untuk memecah belah individu atau kelompok. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat menimbulkan pro dan kontradi masyarakat.

Sikap publik terhadap pengambilan keputusan juga berperan aktif sebagai salah satu faktor yang terlihat serta akan menunjukkan mengenai diterima atau tidaknya kebijakan yang telah dibuat baik dalam nasional maupun internasional. Sikap publik dan opini publik merupakan bagian yang tak terpisahkan, melalui adanya pemberitaan atau tulisan yang bertujuan untuk membentuk perspektif individu atau kelompok sehingga sama-sama dapat menimbulkan respon dari sikap publik mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat keputusan. Sikap publik merupakan adanya proses rangsang individu atau kelompok terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini individu atau kelompok yang kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah menunjukkan ketidak puasaannya, salah satunya dengan melakukan turun ke jalan atau melakukan demonstrasi. Hal ini bertujuan untuk menekan pemerintah agar melakukan peninjauan ulang kembali terhadap kebijakan yang telah dibuat.Selain itu, pengambilan keputusan politik dipengaruhi juga oleh lingkungan geografis atau posisi geografis. Keadaan geografis Negara termasuk dalam batas geopolitik yang di mana suatu Negara memiliki dampak besar pada perpolitikan di Negara lain (Xing, 2015, hal. 43). Dalam hal ini dikatakan apabila Negara A memiliki kebijakan mengenai isu tertentu, dan apabila hal itu akan mempengaruhi preferensi Negara B yang

merupakan Negara tetangga atau bagian dari ruang lingkup regional dari Negara A maka tentunya preferensi Negara B akan represif untuk merespon mengenai kebijakan yang dibuat oleh Negara A.

Sementara faktor eksternal yaitu, kondisi yang ada di luar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain, serta adanya campur tangan dari organisasi internasional dan regional. Faktor eksternal menghubungkan tentang hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional dan Negara sebagai aktor dalam proses pembuat keputusan. Tindakan yang dilakukan oleh Negara di tingkat internasional diatur oleh kepentingan nasional. Pada level internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Kehadiran organisasi internasional seperti PBB, organisasi regional dan sebagainya akan mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A. Disamping itu, kebijakan luar negri suatu Negara akan dapat mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional (Kamps, 2005, p. 23).

Tabel 3. 1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Teori *Decision Making*

Sumber: (Kurniawan, 2017, hal. 1119)

Melalui tabel tersebut, maka decision making memberikan penggambaran mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari Negara.

3.2 Model dari *Decision Making*

Teori *decision making* berusaha untuk menemukan beberapa pertanyaan yang menanyakan;

1. Siapa yang ada di dalam negara yang membuat keputusan politik

2. Apakah keputusan semacam itu rasional atau tidak rasional
3. Apa dampak dari keputusan tersebut pada sistem politik nasional atau internasional

Melalui pandangan Snyder mengenai hal tersebut dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Para pembuat keputusan akan di hadapkan pada faktor tersebut dengan memilih kebijakan yang paling tepat. Disisi lain, *Decision making* memiliki beberapa model dalam proses pengambilan keputusan yaitu(Afinotan, 2014, hal. 252-255):

1. *Rational Actor Model*

   Model aktor rasional melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas di antara pilihan yang lain. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai opsi tersedia. Aktor rasional dalam pengambil keputusan mampu memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif, membandingkan semua alternatif, dan memilih alternatif yang memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost*. Aktor rasional juga kemudian membandingkan konsekuensi yang telah dibuat, yang tentu akhirnya akan menentukan alternatif terbaik. Dalam hal Ini tidak hanya melibatkan keuntungan dan kerugian, tetapi juga memperkirakan kemungkinan dari berbagai hasil yang akan di dapatkannya. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan berkaitan juga

dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut meliputi informasi yang berada di lingkungan mereka, kemudian tentang aktor lain, atau tentang kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka. Situasi tersebut akan lebih sulit apabila aktor lain (lawan) yang mencoba mempersulit untuk diprediksi atas suatu tindakan yang dipilih, bagaimana aktor lawan akan bereaksi terhadapnya, dan apa hasil akhirnya. Hal ini yang menjadikan aktor rasional menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya. Pada akhirnya aktor rasional akan memikirkan ulang kembali mengenai *cost-benefit* yang akan di dapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir.

2. *The Bounded Rationallity Model*

Model ini dapat memberikan solusi dimana kekurangan dari maksimalisasi *benefit* bisa menjadi hambatan. Seperti misalnya, dalam prosesnya mencari pilihan alternatif terbaik, pembuat keputusan tidak mungkin akan mempertimbangkan semua alternatif. Jadi pembuat keputusan dapat menggunakan batasan untuk mempersempit beberapa pilihan alternatif yang lebih masuk akal dan menjanjikan. Model rasionalitas berasumsi setiap aktor tidak bisa mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketika sebuah konsekuensi buruk tertentu muncul, yang dapat dilakukan adalah memodifikasinya untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi itu berulang akan tetapi dengan tingkat yang berbeda.

3. *The Bureaucratic Politics model*

Model dari politik birokrasi di dalamnya pembuat keputusan adalah lembaga pemerintah, yang terdiri dari satu set biro dengan sumber dan tanggung jawab yang berbeda, serta berbeda dalam tingkat pengaruhnya. Berbagai biro atau departemen bersaing di antara mereka sendiri untuk kesempatan untuk mempengaruhi keputusan menggunakan otoritas politiknya. Pengambilan keputusan dalam model ini adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan. Strategi untuk membangun koalisi antar biro mungkin terjadi dalam model ini. Sistem persekutuan atau koalisi ini dalam perjuangan juga untuk mendapat pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Di sini prosesnya sama seperti Negara-Negara dalam membentuk koalisi untuk melawan kekuatan yang lebih dominan.

Model dari *decision making* digunakan untuk mengetahui sikap dari para pembuat keputusan dalam memutuskan kebijakan yang akan dikeluarkan. Penulis, dalam penelitian ini akan menggunakan model dari *Rational Actor* sebab melalui model ini penulis melihat bahwa Negara sebagai aktor utama serta aktor rasional dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Kemanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri (Graham, 1971, p. 33). Maka dalam penulisan ini, penulis memilih model dari rasional aktor mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan yang akan diambil oleh pembuat keputusan. Melalui model ini pula akan di analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh Negara dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingannya.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR 2008

Pada bab ini akan mengimplementasikan dari teori *decision making* yang akan dikaitan dengan kasus perbatasan dari kuil Preah Vihear. Teori *Decision Making* memiliki beberapa faktor yang akan mengkaji lebih dalam mengenai mengapa suatu kebijakan dibuat oleh Negara. Menurut Snyder, *Decision Making* memiliki dua faktor yang menjadikan kebijakan tersebut diambil. Faktor internal dan eksternal, menjadi hal penentu bagi para pengambil keputusan sebelum kebijakan tersebut dibuat. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah terselesaikan oleh pihak ICJ pada tahun 1962, tetapi konflik ini muncul kembali di tahun 2008. Kebijakan Thailand dalam memprotes penobatan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia merupakan bagian yang akan dibahas melalui teori*decision making*.

4.1. Implementasi Teori*Decision Making* dalam sengketa Perbatasan kuil Preah Vihear 2008

Teori *Decision Making*memberikan penggambaran mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari Negara.Pembentukan pengambilan keputusan dipengaruhioleh faktor internal seperti politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan

nasional. Sementara faktor eksternal adalah kondisi yang ada di luar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia.

Apabila menggunakan teori*decision making* dalam permasalahn Thailand dan Kamboja dilihat dari faktor internalnya, adalah konflik perbatasan kuil Preah Vihear yang terjadi merupakan salah satu wujud dari tidak stabilnya kondisi domestik Thailand. Pada masa pemerintahan Samak Sundarajev membuat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan masyarakat Thailand. Pada awalnya pemerintah Thailand menyetujui atas pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia pada tahun 2008. Namun, keputusan untuk menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008 memiliki konsekuensi yang luas pada domestik Thailand maka diperlukan perubahan kebijakan luar negeri Thailand mengenai permasalahan perbatasan kuil Preah Vihear.Hal ini di perparah dengan adanya kebangkitan gerakan nasionalis Thailand yaitu PAD. Kebijakan tersebut mendapati opini, sikap dan respon publik dengan adanya gerakan nasionalis PAD. Soundhi Limthongkul merupakan pemimpin PAD yang memanfaatkan bisnisnya melalui Manager Daily yaitu surat harian miliknya dengan mempublikasikan buku mengenai kuil Preah Vihear. Pada covernya memakai gambar bendera Thailand dengan mengibarkan bendera Thailand di atas kuil Preah Vihear(Grabowsky, 2014, hal. 8).

Konflik perbatasan yang terjadi bermula pada pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di tahun 2008. Pemerintah Kamboja rupanya telah mempersiapkan pendaftaran tersebut sejak lama namun hal itu tidak memberikan dampak yang positif bagi Negara tetangganya yaitu Thailand. Kondisi domestik Negara dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri

suatu Negara. Keputusan untuk menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia juga menghasilkan persaingan politik di Thailand. Isu mengenai perbatasan kuil Preah Vihear digunakan oleh Partai oposisi Demokrat dan mencoba untuk membangkitkan kembali rasa nasionalis Thailand, sehingga masyarakat Thailand khususnya gerakan nasionalis PAD cenderung meminta pemerintah untuk meninjau kembali akan keputusan dalam persetujuannya mengenai pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia.

Disisi lain, peran dari partai politik juga berpengaruhdalam pengambilan keputusan. Salah satu model utamanya adalah model pilihan rasional yang didasarkan pada pelaku individua atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuanuntuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara(Xing, 2015, hal. 42). Konflik kuil Preah Vihear dimanfaatkan oleh partai Demokrat untuk mengambil kekuasaan pada tahun 2008 dengan cara mendukung segala aksi dari demosntrasi gerakan nasionalis PAD. Abhisit Vejjajjiva merupakan pimpinan dari Partai Demokrat membuat keputusan yang menjadikan isu ini sebagai senjata untuk melawan Perdana Menteri Samak Sundarajev dari Partai PPP (People’s Power Party). Artinya, partai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal. Para pihak akan responsif terhadap perubahan opini publik, dan mungkin enggan untuk berkomitmen terlalu kuat terhadap kebijakan tertentu, jika terjadi perubahan opini publik(Derouen, 2010, p. 62).

Apabila faktor internal menunjukkan hubungan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem domestik, sedangkan faktor eksternal menghubungkan tentang hubungan antara Negara-Negara dalam sistem internasional. Pada level analisis domestik adanya kelompok masyarakat menekan pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil sedangkan level internasional adanya Negara-Negara lain dan organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Artinya bahwa kebijakan luar negeri suatu Negara bisa mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A (Kamps, 2005, p. 23).

Kebijakan pemerintah Kamboja dalam mendaftarkan kuil Preah Vihear ke UNESCO merupakan salah satu penyebab menegangnya hubungan dengan Thailand, hal ini membuktikan bahwa kebijakan dari suatu Negara dapat mengganggu Negara lain. Pada pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundarajev, membuat kebijakan bahwa Thailand menyetujui pendaftaran tersebut tetapi ternyata dari kebijakan itu membuat gerakan nasionalis PAD tidak menerima hal tersebut. Gerakan nasionalis menilai kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Samak Sundarajev telah menjual tanah kepada pihak Kamboja. Disisi lain, gerakan nasionalis juga melihat kebijakan ini sangat bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah lalu, yang mana wilayah kuil Preah Vihear pernah menjadi bagian dari kekuasaan Thailand. Gerakan nasionalis PAD

menunjukkan rasa ketidakpuasan atas kebijakan yang dibuat dengan berdemo di perbatasan kuil Preah Vihear. Bukan hanya itu, bahkan hubungan kedua Negara telah memasuki tahap yang lebih serius dengan menempatkan militernya di sepanjang wilayah kuil Preah Vihear. Hasilnya adalah, kedua militer dari masing-masing Negara saling bentrok hingga menewaskan tentara, menewaskan masyarakat sipil hingga penghancuran kuil yang berada di sekitar.

Konflik yang terjadi juga dipicu karna adanya dari tekana domestik dimana partai Demokrat terus menebarkan isu perbatasan dengan mengenai kuil Preah Vihear. Partai Demokrat mencoba mencampurkan rasa sentimen masyarakat Thailand melalui motif *historis*pimpinan dari partai Demokrat yaitu Abhisit menggunakan motif *historis* dalam teritori mengenai kuil Preah Vihear sehingga Abhisit mendapat dukungan serta dinilai sebagai warga Thai asli oleh masyarakat Thailand. Motif *historis* yang digunakan oleh Abhisit akan berkaitan mengenai sumber awal dari konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Motif *historis* tersebut berkaitan dengan masa lalu yang berawal dari perjanjian perbatasan antara pemerintah Perancis dan pemerintah Siam di masa lalu. Maka hal ini yang menjadikan salah satunya alasan Thailand menolak kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia yang menyatakan bahwa dengan perginya Perancis dari Kamboja maka berakhir pula perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah Siam dan pemerintah Perancis dalam perjanjian perbatasan 1904-1907. Konflik yang terjadi tersebut berdasarkan pada ketidakjelasan dari batas-batas yang dibuat antara pemerintah Siam dan Perancis di masa lalu.Berbeda dengan Perdana Menteri Samak yang dituduh oleh demonstran karna telah menjual tanah ke pihak Kamboja dengan menyetujui pendaftaran kuil Preah

Vihear sebagai warisan dunia pada tahun 2008. Melalui teori*decision making* dapat dilihat bahwa peran dari partai politik seperti pimpinan oposisi menggunakan isu kuil Preah Vihear untuk mendapatkan suara maksimal dari masyarakat Thailand. Suara dari masyarakat ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya dukungan yang kuat diberikan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan oposisi Abhisit. Hal ini menjadikan pemerintah Thailand untuk membuat kebijakan ulang atas tekanan yang ada di domestiknya.

Tabel 4. 1 Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Kebijkan Thailandterhadap isu kuil Preah Vihear 2008

Faktor Internal	**Faktor Eksternal**
Persaingan Politik Thailand	Pendaftaran Kuil Preah Vihear ke UNESCO
Kuil Preah Vihear sebagai Identitas Thailand	Perjanjian Franco-Siam 1904-1907
Gerakan PAD sebagai sikap masyarakat Thailand	

Apabila dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa melalui teori*decision making* dapat dibedakan menjadi beberapa faktor yang akan mempengaruhi Negara dalam membuat kebijakan khususnya pihak Thailand. Melalui tabil ini juga terlihat faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear di tahun 2008. Hasilnya adalah teori*decision making* yang dibuat oleh Thailand meliputi proses

yang bersifat *interdependency* artinya perubahan keputusan yang dibuat Thailand tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan faktor eksternal.

4.2 Analisis *Decision Making* Thailand dalam kasus perbatasan wilayah kuil Preah Vihear 2008

Teori *decision making* mampu membedakan antara faktor internal dan eksternal sebagai alasan Negara dalam membuat suatu kebijakan. Penulis akan menggunakan teori *decision making* sebagai analisis mengapa Thailand kembali membahas konflik yang telah selesai di tahun 1962. Menurut Snyder ada dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal yang menjadikan alasan kebijakan tersebut diambil, maka melalui penjelasan Snyder melalui faktor internal dan eksternal akan terlihat alasan Thailand yang menjadikan konflik kuil Preah Vihear sebagai fokus kebijakannya pada tahun 2008. Penjelasan mengenai hal tersebut akan dimulai dari faktor internal yaitu:

4.2.1 Faktor Internal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear 2008

A. Persaingan Partai Politik Thailand

Pada Pemilu 2008 perolehan suara menunjukkanPPP unggul 58 kursi dari pesaing terdekatnya Partai Demokrat. Kemenangan PPP ini membuat Samak Sundarajev naik sebagai Perdana Menteri baru di Thailand. Pada masa pemerintahan Samak muncul kebijakan yang menyetujui bahwa Thailand akan mendukung kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia hanya jika hal ini tidak mengganggu daerah yang belum terselesaikan di dekat kuil Preah Vihear.Partai Demokrat melakukan koalisi dengan gerakan nasionalis PAD

dan menghubungkan isu Preah Vihear untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa di bawah Samak Sundarajev yang dinilai ProThaksin, mereka menuduh Menteri Luar Negeri Thailand menjual negara tersebut, karena dia telah menandatangani bersama Kamboja yang menyatakan bahwa Thailand mendukung pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO.

Thaksin Shinawatra adalah salah satu karakter paling berpengaruh dalam politik Thailand. Thaksin merupakan salah satu mantan Perdana Menteri yang menang dalam pemilihan umum di tahun 2001. Pada saat itu partai milik Thaksin adalah Thai Rak Thai (TRT). Pemerintah Thaksin mempunyai strategi dalam urusan luar negeri terutama mengenai hubungannya dengan Kamboja(Ishak, 2014, hal. 144). Kebijakan luar negeri Thailand di bawah Thaksin memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kamboja. Pemerintahannya secara aktif bekerja sama dalam investasi sektor swasta, pengembangan bisnis regional termasuk perusahaan telepon genggamnya yang berada di Kamboja. Bahkan, Thaksin juga membiayai pembangunan jalan di wilayah Kamboja Barat (Lucas, 2011, hal. 55). Dengan demikian Thaksin memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan hubungan baik dengan Kamboja. Bukan hanya kebijakan luar negri dengan Kamboja yang dibangun baik, bahkan Thaksin menjadi sangat populer di domestiknya.Thaksin adalah seorang miliarder dan perdana menteri pertama dalam sejarah Thailand untuk memimpin pemerintahan terpilih melalui masa jabatan penuh.

Thaksin sangat populer, terutama di kalangan orang miskin pedesaan, tapi tidak populer di kalangan elit di Bangkok.Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, kemiskinan nasional turun dari 21,3% menjadi 11,3%

sertapendapatan Negara Thailandmeningkat sebesar 46%. Thaksin juga memulai sistem perawatan kesehatan universal, mereformasi sistem pendidikan dan mengembangkan infrastruktur Negara. Setelah lebih dari lima tahun berkuasa, dia digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada bulan September 2006. Selama pemerintahan Thakasin, banyak menuai kritikan dari oposisi. Salah satunya adalah gerakan PAD atau kelompok kaos kuning. Gerakan PAD sudah terbentuk ketika masa pemerintahan Thaksin, mereka menuduh Thaksin melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang, Thaksin telah berada di pengasingan.Thaksin menghadapi hukuman penjara dua tahun setelah dinyatakan bersalah.Tapi meski dia berada di luar negeri, dia masih bisa mengendalikan perpolitikan di Thailand dengan adik perempuannya, yaitu Yingluck Shinawatra (Thaksin Shinawatra Biography, 2011).

Pemerintahan Thaksin tahun 2001-2005 berjalan cukup baik. Thaksin berhasil mendapatkan hati masyarakat Thailand. Thaksin dicintai oleh masyarakat kelas bawah. Keberhasilan dari pemerintahan Thaksin yaitu dengan meningkatkan taraf perekonomian Thailand dengan kebijakannya *Thaksinomics* yaitu kebijakan dengan pemberian dana berupa bantuan bagi desa, penghapusan untang bagi petani, pemberian subsidi kesehatan, dan bantuan untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).Perekonomian Thailand mampu berkembang dengan positif setelah krisis 1997 melalui arus investasi. Pemerintahan Thaksin berujung kudeta pada september 2006. Kemudian, pada Desember 2007 Thailand mulai mengadakan pemilu yang berhasil di menangkan oleh Samak Sundarajev dari PPP. Kemenangan yang

diraih oleh Samak juga sebagai pemicu terbentuknya gerakan PAD yang mana gerakan ini merupakan gerakan anti Thaksin. Gerakan PAD beranggapan bahwa Perdana Menteri Samak Sundarajev sebagai boneka dari Thaksin dan menganggap PPP sebagai partai baru dari TRT yang merupakan partai Thaksin yang telah dibubarkan(Thailand political crisis: 2006-2014, 2014).

Berita kemenangan dari PPP diiringi dengan munculnya kembali isu perbatasan Preah Vihear dengan Kamboja.Samak Sundaravej yang berasal dariPPP yang dinilai ProThaksin. Perdana Menteri Samak dituduh menjual tanah Negara, karena dia telah menandatangani bersama Kamboja yang menyatakan bahwa Thailand akan mendukung pendaftaran kuil Preah Vihear untuk menjadi salah satu situs warisan dunia ke UNESCO.Konflik berkepanjangan ini dipengaruhi oleh situasi politik di Thailand. Situasi tersebut juga dihasilkan oleh adanya kebangkitan dari kelompok nasionalisPAD. Partai Demokrat mendukung PAD dalam proses demonstrasi yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Samak pada saat itu. Bahkan ketika demonstrasi ada sebagian dari Partai Demokrat yang mengenakan kaos kuning yang dikenal sebagai kelompok anti Thaksin dengan turun kejalan bersama kelompok PAD.

Partai Demokrat dan PAD memanfaatkan isu Preah Vihear dengan slogan *Khai Chat* dalam berbagai kampanyenya untuk melawan rezim sekaligus sekutu dari Thaksin yaitu PPP. *Khai Chat* memiliki arti dari *Khai* adalah jual dan *Chat* yaitu Negara atau Bangsa sehingga masyarakat Thailand akan terkonstruk dengan slogan ini bahwa pemerintahan pada saat itu telah menjual bangsa atau Negara kepada pihak asing(Askew, 2010). Maka isu ini dinilai

sangat tepat bagi Partai Demokrat untuk menurunkan citra yang dimiliki olehPartai Thaksin agar Partai Demokrat bisa berkuasa di Thailand. Selain itu, isu ini digunakan untuk merah simpati dari rakyat Thailand dengan membangkitkan kembali rasa nasionalisme terhadap masyarakat Thailand.Meskipun Thaksin dalam masa pengasingan sangat terlihat kuatnya pengaruh Thaksin dengan masih memiliki partai yang berada dipihaknya. Hal ini sangat jelas bahwa isu perbatasan digunakan sebagai kepentingan politik dimana Abhisit dalam merebut kekuasaannya ingin mencapai suara yang maksimal dengan cara melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Samak Sundarajev.

Partai Demokrat berkoalisi dengan kelompok nasionalis PAD serta menggunakan kasus ini untuk membawa Menteri luar Negeri ThailandNoppadonPattama ke Mahkamah Konstitusi karna telah menanda tangani persetujuan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008.NoppadonPattama terpaksa mengundurkan. Isu mengenai kuil Preah Vihear yang dihembuskan relatif berhasil karna merubah persepsi masyarakat, selanjutnya di respon oleh parlemen Thailand dengan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Pada 23 hingga 25 Juni 2008, ada perdebatan pada parlemen Thailand yang di pimpin oleh Abhisit Vejjajjiva. Abhisit merupakan pimpinan dari partai oposisi Demokrat. Abhisit berasumsi bahwa dia sebagai masyarakat Thai asli meminta pada anggota parlemen untuk segera memberikan mosi tidak percaya pada pemerintahan Samak di tahun 2008. Hasilnya adalah, Samak mengundurkan diri sebagai perdana menteri Thailand di tahun 2008. Hal ini juga dikarenakan dengan

adanya tekanan publik bagi pemerintahan Samak. Pengganti dariSamak Sundarajev yaitu Somchai Wongsawat digulingkan juga oleh gerakan nasionalis melalui serangkaian demonstrasi

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Thailand pada masa Samak mengundang resiko atas pengambilan keputusan kebijakan luar negri dengan menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008. Pada ruang lingkup internal, Samak di hadapkan dengan adanya demosntrasti yang menentang atas kebijakan yang telah dibuat. Disisi lain, hal ini di manfaatkan oleh partai oposisi yaitu Abhisit sebagai pelaku bagi partainya dalam proses pengambilan keputusan bertindak rasional dan berusaha mencapai tujuan mereka dalam persaingan perpolitikan antara satu sama lain, dengan tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi mereka mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara. Maka dapat dikatakan bahwapartai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal sebagai pendukung kebijakannya. Disamping itu, dengan koalisi yang dilakukan oleh partai Demokrat dan PAD berhasil menjatuhkan pemerintahan Samak dengan tekanan domestik yang semakin banyak.

B. Kuil Preah Vihear sebagai Identitas Thailand

PAD yang juga disebut sebagai kaos kuning merupakan gerakan untuk menentang pemerintah Thaksin. Gerakan PAD merupakan gabungan dari 23 organisasi masyarakat yang berkoalisi dengan pebisnis kaya Soundhi Limthongkul. Soundhi merupakan seorang pemilik dari media bernama The Manager Media Group yaitu surat kabar harian yang setia terhadap kerajaan.Anggota massa dari PAD kebanyakan dari kelas menengah yang

berjumlah lebih dari 10.000 orang di Bangkok. Disisi lain, sebenarnya PAD memliki 5 pemimpin tetapi ada salah satu pemimpin dari PAD yang paling berpengaruh. Sondhi Limthongkul sebagai salah satu seseorang paling sangat mendominasi dengan menyediakan dana untuk kampanye hingga dalam proses kampanye anti Thaksin dengan media yang ada. Sedangkan, 4 pimpinan dari gerakan PAD lainnya memliki peran yang berbeda, ada dari mereka yang memiliki peran dalam mengumpulkan dan mengerahkan massa dalam demonstrasi(Ungpakorn, 2010, hal. 3-34).

Sondhi Limthongkul memanfaatkan medianyaManager Daily yaitu surat kabar harianmiliknya dengan mempublikasikan buku. Publikasi yang dilakukan olehnya merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap kaum nasionalis Thailand. Dukungan yang disampaikan dalam media tersebut mengenai legitimasinya atas kedaulatan kuil Preah Vihear.Publikasi buku yang dilakukan oleh Sondhi dalam cover buku menggunakan gambar dari bendera Thailand yang berkibar diatas kuil Preah Vihear. Buku yang dipublikasikan dengan tidak menggunakan nama penulis tersebut menuduh pemerintah Samak telah melepaskan atas kepemilkan kuil Preah Vihear kepada Kamboja secara sepihak. Padahal apabila dibandingkan dengan para pemimpin Thailand sebelumnya telah berusaha untuk mempertahankan klaim atas kedaulatan kuil Preah Vihear(Grabowsky, 2014, hal. 8).

Apabila dikaitan dengan *decision making*, hal ini telah menunjukkan bahwa opini publik akan sangat mempengaruhi *decision maker* dalam pembuatan keputusan sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Opini publik merupakan pandangan atau pendapat dari individu atau kelompok mengenai

responnya terhadap suatu isu. Dalam hal ini, gerakan nasionalis PAD menunjukkan ketidak puasan atas kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah di tahun 2008 dengan menggunakan media sebagai salah satu bukti bahwa peran media yang berguna untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu, dengan terbitnya buku ini juga guna untuk menggiring perspektif masyarakat Thailand dalam jumlah yang besar untuk ikut dalam mendukung atas pembelaan terhadap kuil Preah Vihear yang mana kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Thailand sejak masa lalu.

C. Gerakan PAD sebagai Sikap Masyarakat Thailand

Pada masa pemerintahan Samak Sundarajev di tahun 2008, muncul kebijakan yang dianggap sangat bertentangan dengan masyarakat Thailand. Kebijakan tersebut ialah, memberikan dukungan Thailand terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia.Noppadon Pattama selaku menteri luar negri yang menjabat pada saat itu, sekaligus sebagai kuasa hukum Thaksin menanda tangani persetujuannya atas dukungan tersebut.Namun, kebijakan tersebut menjadi senjata bagi PAD. Gerakan PAD yang berusaha untuk mengobarkan rasa nasionalis masyarakat Thailand untuk menolak kebijakan yang telah dibuat. Demi menjatuhkan kekuasaan Samak yang dianggap sebagai sekutu Thaksin, gerakan PAD juga di dukung oleh pihak oposisi yaitu partai Demokrat. Kedua belah pihak memanfaatkan betul atas kebijakan yang telah dibuat, dengan menggunakan slogan *Khai Chat* yang memiliki arti menjual tanah milik Negara kepada pihak asing(Chachavalpongpun P. , 2011, hal. 1026).

Kedua belah pihak menggunakan isu tersebut sebagai alat propaganda politik agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat Thailand.Gerakan PAD dan partai Demokrat menuduh pemerintahan Samak dan ada sosok Thaksin yang berada dibelakangnya dalam mempertaruhkantanah seluas 4.6 kilometer persegi yang mengelilingi kuil Preah Viheat itu kepada Kamboja demi kepentingan pribadi. Bukan hanya melakukan demosntrasi dijalan dalam menolak kebijakan pemerintah Samak.Aksi PAD tersebut berusaha dalam menduduki gedung pemerintah. Disamping itu, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Thailand berkaitan dengan adanya tekanan dari domestik. Tekanan domestik berusaha agar pemerintah melakukan peninjauan ulang kembali atas kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menangani permasalahan yang terjadi. Dapat disimpulkan maka dengan adanya tekanan dari masyarakat, akan mempengaruhi pemerintah Thailand dalam mengambil kebijakannya mengenai isu kuil Preah Vihear.

4.2.2 Faktor Eksternal yang mempengaruhi Kebijakan Thailand dalam isu kuil Preah Vihear 2008

A. Pendaftaran Kuil Preah Vihear ke UNESCO 2008

Setelah beberapa tahun, konflik tersebut pecah lagi antara Thailand dan Kamboja mengenai kuil Preah Vihear.Pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO sebagai warisan dunia adalah episode baru hubungan Thailand dan Kamboja. Keadaan menjadi tegang ketika UNESCO setuju untuk mempertimbangkan permintaan dari pihak Kamboja yang akan mendaftarkan kuil Preah Vihearsebagai salah satu warisan dunia 2008. Pemerintah Thailand

mencoba memprotes hal ini di UNESCO. Mereka berargumen bahwa usulan Kamboja akan merugikan Thailand, karena akan melanggar kedaulatan Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar kuil. Menurut ICJ pada tahun 1962, Preah Vihear memiliki Kamboja. Namun, keputusan itu tidak menutupi tanah 4.6 kilometer persegi yang mengelilingi sekitar kuil Preah Vihear dan samapi saat ini belum ditentukan kepemilikannya.

Penulis, melihat pola yang dapat di analisis melalui *decision making* atas awal dari munculnya kembali konflik antara Thailand dan Kamboja di tahun 2008. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Thailand berawal di mana pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia ternyata mengubah kebijakan luar negeri Thailand. Meskipun pada awalnya pemerintah Thailand setuju atas pendaftaran tersebut tetapi melalui faktor internal yang telah ditemukan dengan adanya kelompok domestik seperti PAD berupaya untuk menolak kebijakan tersebut dengan caramenekan pemerintah melalui isu perbatasan kuil Preah Vihear agar membuatkebijakan yang sesuai dengan tuntutanmereka, bahkan konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja bukan lagi hanya mengenai tanah yang menutupi area tersebut tetapi juga tekanan domestik membahas kembali masa lalu dimana kuil tersebut juga pernah menjadi bagian dari Thailand. Selain ituadanya persaingan politik khususnya Partai Demokrat berupaya untuk mencari pengaruh dan mencari suara semaksimal mungkin dengan cara menjalin koalisi dengan kelompok tersebut. Maka dengan adanya tekanan yang dibuat pada ruang lingkup internal hasilnya adalah pemerintah Thailand menjadikan isu perbatasan kuil

Preah Vihear sebagai fokus permasalahan mengenai kebijakan yang akan dibuat di tahun 2008.

B. Perjanjian Franco-Siam 1904-1907

Kamboja atau Angkor merupakan bagian utamadari Kekaisaran Khmer. Namun, kemunduran Kekaisaran Khmer mulai terlihatpada abad ke-13. Pada tahun 1431 Raja Authai (Siam) menaklukkan wilayah Kamboja.Sejak beberapa dekade wilayah Kekaisaran Khmer telah mengalami penurunan danbeberapa daerah termasuk daerah dimana kuil Preah Vihear tersebut berada di tangan Kerajaan Siam. Kemudian pada tahun 1863, Perancis mulai mengkolonialisasi Kamboja karena wilayah Kamboja sebagaian duduki oleh Thailand pada saat itu kemudian, Perancis mencoba untuk merebutnya dan terjadi perang antara Thailand dan Perancis di tahun 1893. Thailand mengalami kekalahan hingga harus menarik tentaranya dari arah Tmiur Sungai Mekong, lalu Siam terpaksa meninggalkan klaim teritorial disebelah timur Sungai Mekong. Kemudian serangkaian perjanjian dibuat oleh Siam dan Perancis ditandatangani antara tahun 1902 dan 1907, termasuk sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangkrek Timur dimana Kuil Preah Vihear berada (Tun, 2011, pp. 14-15);

Sesuai dengan artikel 1 dan 3 yang telah dijelaskan pada latar belakang, kedua belah pihak sepakat membentuk Komisi untuk memetakan garis-garis batas Negara di berbagai daerah, termasuk bagian Timur dari jangkauan Dangrek. Hasil survei mereka kepada komisi bersama yang membuat seluruh tanjung di Pegunungan Dangrek termasuk daerah kuil Preah Vihear di sisi

Kamboja. Pada saat itu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap peta Annex I yang dihasilkan komisi bersama ini(Raharjo S. N., 2013, hal. 112). Namun, Komisi campuran tersebut tidak pernah secara formal menyetujui peta tersebut yang juga dikenal sebagai peta Annex I, apalagi tidak ada bukti secara formal disetujui oleh pihak Siam

Ketika Siam yang telah berubah menjadi Thailand pada tahun 1940-an mengklaim bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan peta tersebut, di mana kuil Preah Vihear seharusnya menjadi bagian dari wilayah Thailand. Thailand memanfaatkan kehadiran Jepang pada Perang Dunia II pihak Thailand mengusulkan untuk mengadakan negosiasi mengenai revisi perbatasan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang yang merupakan hasil dari tahun 1904 dan 1907 perjanjian. Selama periode ini, Thailand melakukan negosiasi rahasia dengan Jepang dengan mengizinkan pasukan Jepang untuk melewati wilayah Thailand jika perlu untuk mengambil daerah milik Perancis dengan harapan sebagai imbalannya bantuan Jepang untuk merebut kembali wilayah yang telah hilang. Thailand menyerang Perancis termasuk bagian Utara-Barat Kamboja pada bulan Januari 1941 dan dikembalikannya wilayah yang disengketakan di bagian barat Sungai Mekong. Menghadapi tekanan yang luar biasa, Perancis tidak punya pilihan kecuali menerima Intervensi Jepang untuk negosiasi antara Perancis dan Thailand, dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan di Tokyo pada bulan Maret 1941. Menurut kesepakatan tersebut, Perancis mengizinkan Thailand untuk menguasai sebagian besar wilayah, termasuk kuil Preah Vihear. Berakhirnya perang dunia II, Perancis dan Thailand menandatangani sebuah kesepakatan penyelesaian pada bulan

November 1946 sebab sekutu atau Jepang telah kalah, Thailand setuju untuk mengembalikannya wilayah yang diambil berdasarkan perjanjian 1941 dengan Perancis. Pada bulan Februari 1949 pihak Thailand menempatkan empat penjaga Thailand di kuil Preah Vihear. Catatan tindak lanjut dikirim ke tim Thailand pada bulan Maret dan Mei 1949 dan pada bulan Juli 1950, dalam catatan ini, Perancis bahkan meminta penarikan penjaga Thailand dari wilayah kuil Preah Vihear, tetapu tidak ada jawaban datang dari Thailand (Tun, 2011, hal. 115).

Keterkaitan sejarahatas kuil Preah Vihear merupakan salah satu alasan Thailand menganeksasi wilayah kuil Preah Vihear yang pada saat itu telah direbut oleh Raja Siam dari Khamer Merah. Dari sisi Thailand menganggap bahwa kuil Preah Vihear pernah diduduki oleh Kerajaan Siam di masa lalu maka tindakan yang dilakukan Thailand ini tentunya untuk merebut kembali apa yang semestinya menjadi miliki Thailand salah satunya adalah wilayah Preah Vihear. Tetapi dilain sisi dengan adanya tindakan Perancis dengan mengirim surat kepada pihak Thailand merupakan salah satu bukti bahwa pada saat itu wilayah Preah Vihear bagian dari Kamboja dan Perancis yang memang sebagai pemegang wilayah Kamboja pada saat itu penting untuk mengamannkannya sebab peta Annex I sudah dibuat dan telah disetujui meskipun secara formal pihak Siam tidak pernah mengatakan setuju untuk peta Annex I. Momentum Kemerdekaan Kamboja pada 1953 yang diberikan oleh Perancis kembali dimanfaatkan oleh Thailand untuk menolak hasil Perjanjian Franco-Siam 1904 dan 1907. Kuil Preah Vihear kembali diokupasi

oleh Thailand pada tahun 1954 dengan menempatkan tentara dia area kuil Preah Vihear(Raharjo S. N., 2013, hal. 113).

Keterkaitan sejarah serta posisi georafis atas kuil Preah Vihear sebagai salah satu alasan Thailand mengapa kembali membahas konflik perbatasan kuil Preah Vihear di tahun 2008. Abhisist mencoba untuk mencampurkan rasa sentimen nasionalis masyarakat Thailand demi mendapatkan dukungan atas kebijakannya untuk menekan pemerintah dengan menggunakan motif *historis*. Bahkan, Abhisit mendukung isu ini sebagai salah satu caranya untuk mendapatkan suara semaksimal mungkin dengan tujuan menyingkirkan pihak lawan demi untuk memenangkan jabatan. Abhisit akan di nilai sebagai sosok yang mampu menangani atas tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Thailand mengenai isu ini. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja bukan hanya sebatas atas wilayah 4.6 kilometer persegi, konflik ini tetap berkaitan dengan masa lalu faktanyta gerakan PAD juga telah menerbitkan sebuah buku yang menjadikan keterkaitan sejarah sebagai salah satu titik penting bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Negaranya. Hal ini dimanfaatkan kembali oleh Thailand dimana Thailand mencoba untuk mengembalikan sejarah bahwa kuil Preah Vihear masuk sebagai wilayah Thailand bukan Kamboja. Kemudian, dengan adanya tuntutan dari masyarakat domestik menjadikan pemerintah Thailand membahas kembali wilayah kuil Preah Vihear di tahun 2008.

4.3 Analisis *Rational Actor Model* dalam pengambilan kebijakan Thailand mengenai kasus perbatasan kuil Preah Vihear 2008

Dalam hal ini terdapat dua hal yang mempengaruhi keputusan Thailand dalam pengambilan kebijakan yang menjadikan pemerintah memunculkan isu kuil Preah Vihear di tahun 2008. *Yang pertama*, apabila dikaitkan dengan *Rational Actor Model*,Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang berusaha untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya.Kemanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri, maka dalam kasus kuil Preah Vihear,pada proses pengambilan keputusannya Thailand sebagai aktor yang rasional mencoba membuat kebijakan yang akan memuaskan domestiknya. Melalui proses pengambilan keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan *cost and benefit* yang akan didapat. Maka apabila kebijakan mengenai kuil Preah Vihear tidak segera dibentuk, Pemerintah melihat *cost,*yang akan didapatkannya yangakan berdampak bagi domestiknya. Thailandpengambilan keputusannya dengan melakukan tindakan yang rasional dimana memuat kepentingan nasionalnya yang juga akan membentuk keamanan nasionalnya. Kerugian yang akan didapatkan oleh pemerintah Thailand adalah semakin tidak stabilnya situasi dan kondisi politik di Thailand. Disamping itu, melalui kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Samak lalu dengan menyetujui kuil Preah Vihear ke UNESCO membuat bangkitnya kembali gerakan nasionalis PAD yang menolak kebijakan tersebut. Pada tingkat domestik adanya tekanan terhadap pemerintah

agar pemerintah melakukan tinjauan ulang kembali terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan untuk isu kuil Preah Vihear.

Yang kedua, melalui model rasional aktor ini pemerintah Thailand berupaya untuk membuat kebijakan yang mana memuat kepentingan nasionalnya yang tujuannya membentuk kemanan nasionalnya.Pemerintah ditingkat internasional berupaya untuk memaksimalkan kemampuanyadan membuat kebijakan yang akan memuaskan tekanan-tekanan dari domestik.Hal yang dilakukan oleh Thailand adalah dengan memprotes hal ini pada UNESCO bahwa putusan untuk menobatkan kuil Preah Vihear akan membuat hubungan Thailand dan Kamboja tidak baik. Thailand mengatakan perselisihan itu muncul karena pemerintah Kamboja menggunakan peta yang dibuat selama koloni Perancis di Kamboja di mana penetapan yang didasarkan pada peta yang dibuat pada tahun 1904-1907 ini dianggap tidak sah oleh Thailand karena peta ini hanya dibuat secara sepihak oleh Perancis. Thailand beranggapan bahwa, apabila menggunakan garis daerah aliran sungai yang benar dalam penetapan garis batas seharusnya kuil Preah Vihear masuk ke dalam daerah kedaulatan Thailand.Penolakan Thailand terhadap putusan UNESCO yang akan menobatkan kuil Preah Vihear selanjutnya, dengan di nobatkannya sebagai warisan dunia tentunya untuk mempromosikan kuil Preah Vihear sebagai simbol budaya dan agama dari Kamboja.Penolakan yang dilakukan oleh Thailand ialah karena Thailand menganggap bahwa kuil ini bukan milik Kamboja saja, karena bukan hanya masyarakat Kamboja yang melakukan ibadah di dalam kuil Preah Vihear namun masyarakat Thailand yang hidup di sekitar kuil ini juga beribadah di kuil tersebut.

Bukan hanya itu, Thailand dalam penolakannya terhadap usulan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dianggap akan merugikan pihaknya, karena hal itu dinilai akan melanggar kedaulatan Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar kuil Preah Vihear. Tanah yang dituntut oleh pihak Thailand adalah tanah seluas 4.6 kilometer persegi di daerah kuil Preah Vihear. Menurut putusan ICJ pada tahun 1962, kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja. Namun, keputusan itu tidak menutupi area 4.6 kilometerpersegi yang mengelilingi kuil Preah Vihear yang sampai saat ini belum ditentukan.

Dengan adanya kebijakan penolakan atas kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia, pemerintah berharap bahwa *benefit* yang akan didapatkannya yaitu, terbentuknya keamanan nasional Thailand. Kemanan nasional yang dimaksud tersbut adalah stabilnya kembali situasi domestik di Thailand. Pada ruang lingkup internasional pemerintah mencoba untuk membuat kebijakan yang akan memuat dari kepentingan nasionalnya serta memuaskan tekanan-tekanan dari domestik Thailand yang meminta untuk membuat peninjauan ulang atas kebijakan mengenai kuil Preah Vihear. Dapat dikatakan bahwa, dengan menimbang *cost* yang didapatkan akan leih merugikan bagi Thailand maka hal ini yang menjadikan pemerintah Thailand untuk memunculkan kembali isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008, merupakan sebagai awal konflik antara Thailand dan Kamboja. Konflik yang terjadi merupakan hasil dari situasi kondisi domestik yang tidak stabil di Thailand. Pihak Thailand awalnya menyetujui kebijakan yang dibuat oleh Kamboja dengan mendaftarkan kuil Preah Vihear ke UNESCO. Namun, dukungan dari pemerintah Thailand membuat situasi domestik Thailand menjadi tidak stabil. Hal ini juga memaksa pemerintah Thailand harus membuat peninjauan ulang kembali atas kebijakan yang dibuat mengenai perbatasan kuil Preah Vihear di tahun 2008. Berdasarkan analisis penulis melalui teori*decision making*, telah menjelaskan atas kebijakan Thailand mengenai konflik kuil Preah Vihear di tahun 2008. Menurut Snyder, melalui *decision making* dapat melihat perilaku Negara dalam hubungan internasional. Snyder membagi beberapa faktor yang menjadikan alasan mengapa Negara membuat kebijakan tertentu. Faktor internal dan eksternal akan membentuk preferensi Negara pada pembuatan kebijakan luar negri. Faktor internal meliputi politik domestik, opini public, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal adalah kondisi yang ada di luar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia. Peneliti menemukan jawaban mengenai alasan atas kebijakan Thailand dengan menjadikan isu kuil Preah Vihear sebagai fokus kebijakannya pada tahun 2008.

Pertama, faktor internal yang mempengaruhi Thailand dalam isu kuil Preah Vihear di tahun 2008 adalah bermulai dari pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008. Pada pemerintahan Samak muncul kebijakan yang menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia 2008, namun hal ini membuat bangkitnya kembali gerakan nasionalis Thailand yaitu PAD yang menolak kebijakan tersebut. PAD menolak kebijakan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Samak dengan menuduh bahwa pemerintahan Samak telah mengorbankan tanah seluas 4.6 kilometer persegi. Tanah yang di maksud adalah tanah yang mengelilingi kuil Preah Vihear. Tidak berhenti pada usahanya melakukan demonstrasi, salah satu pimpinan PAD yang paling mendominasi yaitu Sondhi Limthongkul memanfaatkan medianya Manager Daily yang berupa surat harian miliknya dengan mempublikasikan buku. Publikasi buku ini merupakan suatu bentuk dukungan bagi kaum nasionalis mengenai legitimasi mengenai kedaulatan atas kuil Preah Vihear bagi Thailand.Pada publikasi buku yang diterbitkan tersebut menggunakan cover dengan gambar bendera dari Thailand yang berkibar diatas kuil Preah Vihear. Buku tersebut menyalahkan pemerintah Samak yang dianggap telah melepaskan kepemilikan kuil Preah Vihear.

Apabila dilihat melalui decision making, adanya gerakan PAD ini merupakan salah satu dari sikap publik atau respon masyarakat Thailand yang tidak menyetujui kebijakan itu. Gerakan PAD memberikan tekanan kepada pemerintah dengan melakukan demonstrasi dengan tujuan agar pemerintah melakukan tinjauan ulang atas keputusan yang telah dibuat dengan menyetujui kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia dari pihak Kamboja pada tahun 2008. Disamping itu peran dari opini publik juga sangat penting bagi pembuat

keputusan sebelum atau sesudah membuat kebijakan. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. Bukan hanya demostrasi, gerakan PAD menunjukkan ketidakpuasan atas kebijakan yang telah dibuat dengan mempublikasikan buku mengenai kuil Preah Vihear. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sangat bertentangan sehingga pemerintah Thailand harus membuat kebijakan yang mementingkan nasionalnya karna dengan adanya tekanan dari domestik. Hal ini yang menjadikan pemerintah Thailand memfokuskan isu kuil Preah Vihear di tahun 2008.

Konflik ini juga dimanfaatkan oleh partai oposisi partai Demokrat untuk melawan pemerintahan Samak. Hal ini menunjukkan adanya persaiangan partai politik di Thailand. Partai Demokrat melakukan koalisi dengan gerakan PAD, dengan mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PAD. Bahkan dalam proses demonstrasi yang dilakukan ada beberapa dari partai Demokrat yang ikut turun ke jalan. Dalam proses melawan pemerintahan Samak, Abhisit sebagai pimpinan partai Demokrat menggunakan slogan *Khai Chat* yang berarti pemerintah telah menjual tanah negara kepada pihak Kamboja. Disisi lain, Abhisit juga menggunakan motif *historis* atas teritori Thailand. Melalui motif *historis* itu membuat semakin banyaknya masyarakat Thailand untuk mendukung atas kebijakannya untuk menekan pemerintah. Dengan adanya tekanan domestik dari masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat oleh Samak, memaksa Samak harus meninggalkan posisinya sebagai perdana menteri. Dalam hal ini, Abhisit sebagai pelaku bagi partainya dalam proses pengambilan keputusan berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain dalam persaingan politik di Thailand, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu

sendiri, tapi untuk memenangkan suara. Partai politik cenderung mengejar kebijakan yang menjamin jumlah suara maksimal.

Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Thailand pada konflik kuil Preah Vihear di tahun 2008 adalah Pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia ternyata mengubah kebijakan luar negri Thailand. Meskipun pada awalnya pemerintah Thailand setuju tetapi dengan adanya kelompok-kelompok domestik seperti PAD berupaya untuk menolak kebijakan tersebut dengan cara menekan pemerintah melalui isu perbatasan kuil Preah Vihear. Dapat disimpulkan bahwa pada tingkat nasional adanya kelompok domestik yaitu gerakan PADThailand berusaha untuk mencapai kepentingannya dengan cara menekan pemerintah agar membuat kebijakan yang sesuai dengan tuntutan tersebut.Disamping itu, adanya partai oposisi Demokrat berupaya mencari pengaruh dengan berkoalisi dengan gerakan PAD. Sedangkan, pada tingkat internasional pemerintah Thailand berupaya memaksimalkan kapasitasnya untuk memuaskan tekanan domestik serta berupaya dalam meminimalkan kemungkinan yang akan terjadi dalam konsekuensi yang bisa merugikan pihaknya. Hal ini ditunjukkan dengan model dari *Rational Actor*, dengan menimbang *cost and benefit* yang akan didapatkan. Dalam kebijakan yang dibuat pemerintah harus memuat dari kepentingan nasional yang akan membentuk kamanan nasionalnya. Hasilnya adalah pemerintah Thailand menjadikan isu perbatasan kuil Preah Vihear sebagai fokus permasalahan Negaranya mengenai kebijakan yang akan dibuat.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini melalui teori*decision making*hanya berfokus dari pandangan Thailand. Kemudiandalam tulisan ini sudah di jelaskan bahwa adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Thailand dalam pembuatan kebijakannya mengenai konflik yang sebenarnya telah usai tetapi terjadi lagi di tahun 2008. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak mencoba untuk melihat dari sisi Kamboja dalam kebijakannya mengenai isu kuil Preah Vihear di tahun 2008. Sehingga penulis menyarankan apabila ada penelitian selanjutnya maka perlu untuk dilihat melalui sisi Kamboja agar dapat terlihat pola yang mempengaruhi Kamboja dalam isu kuil Preah Vihear.

DAFTAR PUSTAKA

Afinotan, L. A. (2014). Decision Making inInternational Relations: A theoretical Analysis. *Canadian Social Science Vol. 10, No. 5* , hal. 252-255.

Alvarez, J. E. (2011). Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia vs. Thailand). *The American Journal of International Law Vol. 56, No.4* , hal. 1035.

Askew, M. (2010). *Legitimacy Crisis in Thailand.* Silkworm Books.

BBC. (2013, 11 11). *Mahkamah PBB putuskan wilayah sengketa*. Dipetik Mei23,2017dari BBC: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131111_thailand_perebutancandi

BBC. (2013, November 11). *Mahkamah PBB putuskan wilayah sengketa*. Dipetik May 23,2017,dari BBC:http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131111_thailand_perebutancandi

BBC. (2017, November 7). *Thailand-Cambodia temple dispute*. Dipetik October 10, 2017,dari BBC: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12378001

Bowornwathana, B. (2013). Decision Making Theories in International Relations. *Research Submitted to Faculty Vol.17 No.4* , hal. 123.

Chachalvangpongpun, P. (2012). *Yingluck Shinawatra's Foreign Policy*. Dipetik Januari 11,2018, dari http://web1.iseas.edu.sg/?p=6715

Chachavalpongpun, P. (2013). Thai-Cambodia Conflict: The Failure of ASEAN's Dispute Settlement Mechanism. *Asian Journal of Peacebuilding vol. 1 no. 1* , hal. 70.

Chachavalpongpun, P. (2011). The necessity of enemies in Thailand troubled politics (The Making of Political Otherness). *Asian Survey vol.51 No.6* , hal. 1019-1041.

Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daymon, C. (2007). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications (Terjemahan. Cahya Wiratama).* Jakarta: Bentang Pustaka.

Derouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decison Making.* New York: Cambridge University Press.

Dewi, R. (2013). Dispute Settlementofthe Thailand– Cambodia Border (Case:Disputeover Preah Vihear Temple). *7th Berlin conference On Asian Security (BCAS) Territorial Issues in Asia Drivers, Instruments, Ways Forward, SriftungWissenschaft und Politik German Insttitute For International and Acurity Affairs* (hal. 3-4). Berlin: Sriftung Wissenschaft and Politik.

Grabowsky, V. (2014). Heritage and nationalism in the Preah Vihear dispute. *SEATIDE Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion* (hal. 8). Voices from Cambodia: Discourse on the Preah Vihear Conflict.

Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatiif Aplikasi Dalam Pendidikan* . Bogor: Deepublish.

Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampaiKonstruktivisme.* Bandung: Nuansa .

Head, J. (2018, July 15). *Political tensions driving temple row*. Dipetik May 16, 2018, dariBBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7507425.stm

ICJ. (2013). Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Caseconcerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). *Judgment ICJ Report* , 281.

ICJ ruling on Preah Vihear Nov 2011. (2013, Oktober 16). Dipetik July 17, 2018, dari Bangkok Post: https://www.bangkokpost. com/news/politics/374994/icj-sets-date-for-ruling-on-preah-vihear

Irewati, A. (2015). *Sengketa wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Ishak, Y. (2014, Juli 18). Thailand's Foreign Policy: The struggle For Regional Leadership in SoutheasnAsia. *Globalization, Development and Security in Asia Vol.1 No. 1* , hal. 144.

Kafarneh, A. A. (2013). Decision making in foreign policy. *Journal of Law, Policy and Globalization Vol.10 no.1* , hal. 62-70.

Kamps, A. G. (2005). The State between Internal and External Pressure: Exploring the Impact of Power Structures at Different Levels of Analysis on State Preference Formation with Regard to Foreign Policy. *Paper for ECPR Joint Sessions, Workshop: Foreign Policy Analysis: Theory and Practice* , 23.

Kurniawan, B. I. (2017). Alasan Rusia Menjadi Pengamat Dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Sejak Tahun 2005. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 4* , hal. 1121-1126.

Lucas, G. B. (2011). The Preah Vihear Temple: What's In A Claim? *Thesis and Dissertation Collection Calhoun Institutional Archive of the Naval Postgraduate School* , 55.

Mackinnon, I. (2008, July 16). *Theguardian*. Dipetik Februari 2018, 1, dari Cambodia claims Thai troops cross border in temple dispute:https://www.theguardian.com/world/2008/jul/16/cambodia.thailand

Morgenthau, H. J. (2010). *Politics among nations, the struggle of power and peace (terjemahan. S. Maimoen, A.M, Fatwan, Cecep Sudrajat,).* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prasetyo, D. B. (2012). The demosntration of The Red Shirt Mass To Prime Minister Abhisit Vejjajiva in Thailand in 2010. *Reserach Report Submitted to faculty* , 4.

Raharjo, S. N. (2013). Tantangan konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi stabilitas ASEAN. *Jurnal Kajian Wilayah Vol. 4, No. 1* , hal. 112.

Shadbolt, P. (2013, November 12). *Thai villagers return after verdict on disputed Preah Vihear temple*. Dipetik April 12, 2018, dari CNN:https://edition.cnn.com/2013/11/12/world/asia/thailand-cambodia-temple/index.html

Snyder, R. C. (1962). *Foreign Policy Decision- Making: An Approach to the Study of International Politics.* New York: Glencoe.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Thailand political crisis: 2006-2014. (2014). Dipetik Januari 17, 2018, dari AsianCorrespondent:http://asiancorrespondent.com/118321/2006-2014-thailand-politicalcrisis-timeline/

Thaksin Shinawatra Biography. (2011, Juni 24). Dipetik Januari 11, 2018, dari THEFAMOUSPEOPLE:https://www.thefamouspeople.com/profiles/thaksin-shinawatra-6873.php

Troops pulled from Preah Vihear. (2012, July 19). Dipetik July 17, 2018, dari Bangkok Post: https://www.bangkokpost.com/news/local/303154/troops-pulled-from-preah-vihear

Tun, K. M. (2011). Towards a Peaceful Settlement of the Preah Vihear Temple Dispute. *Asia Paper Institute for Security and Development Policy* , 22-24.

Ungpakorn, G. J. (2010). *Thailand's crisis and the fight for democracy.* Bangkok: Worker Democracy Press.

Wagener, M. (2011). Lessons From Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intesity. *Journal of Current southeast Asian Affrais, Vol.30 No.3* , hal. 32.

Wong, B. K. (2013). Temple Wars: Cambodia's Dispute Over Preah Vihear Ownership and Its Effects On National POwer. *A Research Report Submitted To Faculty* , 24.

Xing, Y. (2015). Analysis of Political Decision-Making and Its Influencing Factors. *Journal Cross-Cultural Communication Vol. 11, No. 3* , hal. 42-45.